



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471);
23. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466) ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45);
32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 39);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
37. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 73), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 98

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 Ayat (29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra menjadi dasar bagi PD untuk menyusun renja yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renstra dapat diubah jika RPJMD mengalami perubahan.

Dokumen perencanaan di daerah terdiri atas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan PD. Pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD; RPJMD; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana PD, terdiri atas Renstra PD dan Renja PD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renstra dan Renja berlaku mutatis mutandis terhadap proses penyusunan perubahan Renstra dan Renja, yang dilakukan PD dengan berkoordinasi, bersinergi dan melakukan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang terkait sesuai tahapan, yang dimulai dengan (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan forum PD/lintas PD; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan. Proses penyusunan renstra PD dilaksanakan sesuai

ketentuan Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tahapan:	Proses:	Keterangan:
Persiapan Penyusunan Renstra	a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD; b. pembentukan tim penyusun Renstra PD dimulai dari penyiapan rancangan SK Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf PD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. c. orientasi mengenai Renstra PD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD; d. Tim penyusun Renstra PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana PD. e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.	a. Tim penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala PD dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan SK Bupati. b. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sekurang-kurangnya: Ketua (Kepala PD), Sekretaris (Sekretaris PD), Pokja (disesuaikan dengan kebutuhan (pejabat/staf PD dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli). c. Tujuan orientasi adalah untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai per-UU berkaitan dengan renbangnas dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi renbang daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen renbang daerah. d. Bahan orientasi mengenai dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD, mencakup: (1) per-UU yang terkait dengan renbang dan penganggaran daerah; (2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD; dan (3) Buku-buku literatur tentang renbang dan penganggaran daerah.
Penyusunan Ranwal Renstra PD	a. analisis gambaran pelayanan; b. analisis permasalahan; c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; d. analisis isu strategis; e. perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; f. perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; dan	a. Penyusunan ranwal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan ranwal RPJMD; b. Penyusunan ranwal Renstra PD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; gambaran pelayanan PD; permasalahan dan isu strategis PD; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

	g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam ranwal RPJMD. c. penutup.	
Penyusunan Rancangan Renstra PD	a. Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan ranwal renstra PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan renstra PD. b. Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD/lintas PD. c. Hasil kesepakatan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam Berita Acara. d. Rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara. e. Rancangan Renstra PD disajikan dengan sesuai sistematika standar. f. Rancangan Renstra PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RPJMD. g. Penyampaian Rancangan Renstra PD paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan forum PD/lintas PD.	a. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD. b. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan ranwal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara. c. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra PD kepada PD. d. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renstra PD. e. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA. f. Verifikasi rancangan Renstra PD disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra PD.
Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD	a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA. b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. c. Forum PD/lintas PD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra PD. d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima.	a. Hasil pelaksanaan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/lintas PD.

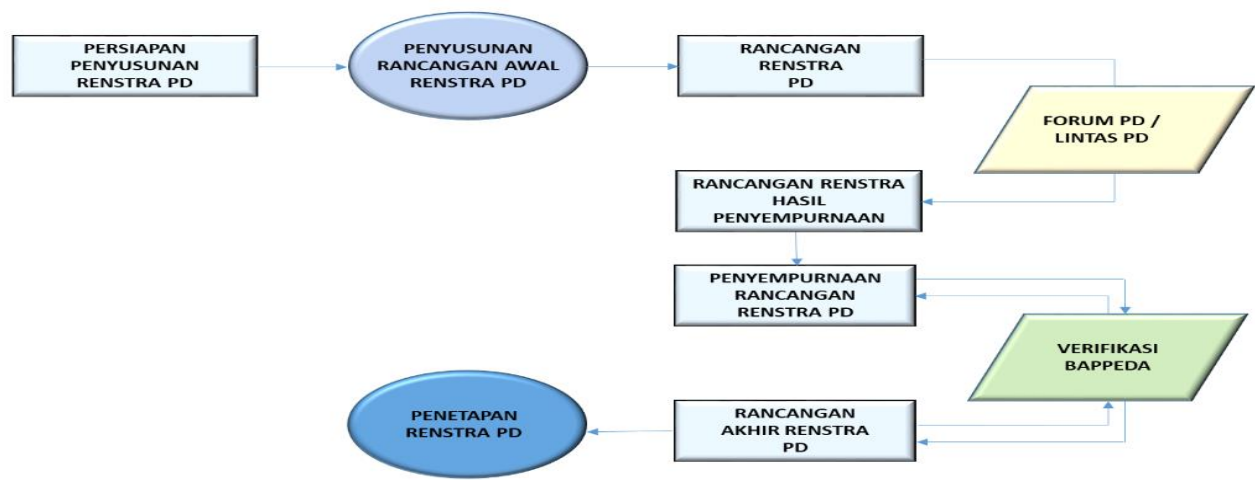
Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD	a. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD. b. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD. c. Rancangan akhir Renstra PD disajikan sesuai dengan sistematika.
Penetapan Renstra PD	a. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. b. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD kepada kepala PD. c. Verifikasi rancangan akhir Renstra PD paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra PD. d. Rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD. e. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang mencakup:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Renstra;
4. Pelaksanaan Musrenbang;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra; dan
6. Penetapan Keputusan Tentang Renstra

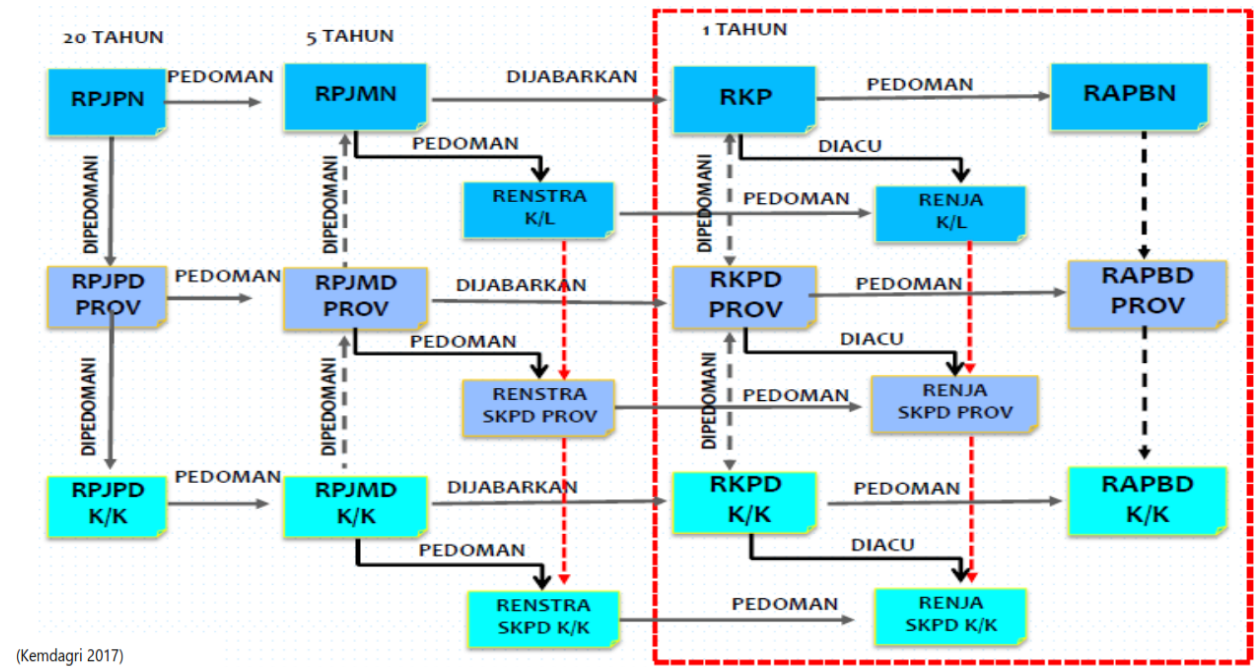
Seluruh proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa sebagaimana disajikan di atas, dapat digambarkan seperti di bawah ini:

Gambar 1.1. Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa juga memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten, proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah provinsi terkait, serta proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.2. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2020 Nomor 471);
22. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45);
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 39);

26. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
30. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 33);
31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 23);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

Tujuan penyusunan perubahan renstra adalah sebagai acuan dalam menjalankan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selengkapny mengenai tujuan disusunnya Renstra sebagai berikut:

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra mempunyai sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan;

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan terhadap renstra Perangkat Daerah Prov NTB, telaahaan RTRW dan KLHS pada RPJMD, serta penentuan isu-isu strategis, sehingga menjadi jelas apa yang strategis untuk ditangani melalui Renstra Perasngkat Daerah.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, beserta indicator dan target kinerjanya setiap tahun dalam jangka menengah. Setiap tujuan mempunyai sasaran, dan keduanya mempunyai indikator kinerja masing-masing.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif, serta memuat Arah Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam jangka menengah, sehingga dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja program (outcome), indikator kinerja kegiatan (output), berdasarkan kelompok sasaran dengan pendanaan indikatif masing-masing untuk setiap tahun dalam jangka menengah, sehingga tergambar kinerja yang dicapai pada akhir periode Renstra.

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah tersebut, merupakan indicator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga gambaran umum dari keseluruhan kinerja akhir periode Renstra tersebut menunjukkan peran Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi RPJMD.

Bab VIII : Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, serta Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan dua urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa yaitu sebagai berikut :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing dari sekretaris dan kepala bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa diuraikan sebagai berikut :

A. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
2. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
3. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
5. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan;
2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan Keluarga Berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana, dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kesetaraan gender dan peningkatan kualitas keluarga serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;

3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, Adapun tugas dan fungsi unit pelaksana teknis berdasarkan peraturan bupati tersebut adalah sebagai berikut :

A. Kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana

Tugas dari kepala unit pelaksana teknis keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam melaksanakan tugas tersebut kepala unit pelaksana teknis keluarga berencana menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Penyusunan rencana kerja UPT Keluarga Berencana
2. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
3. Penyusunan program dan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
4. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
5. Pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
6. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

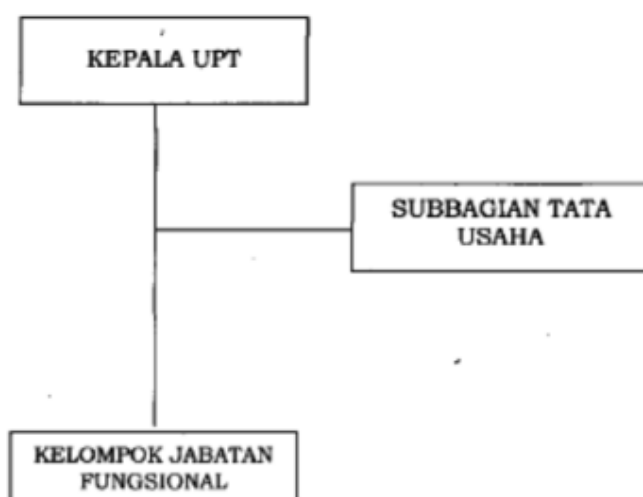
B. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

Tugas dari kepala unit pelaksana teknis Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala unit pelaksana teknis Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT perlindungan perempuan dan anak
2. Menyusun program kerja UPT perlindungan perempuan dan anak
3. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus
4. Mengevaluasi hasil kerja UPT perlindungan perempuan dan anak
5. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT perlindungan perempuan dan anak
6. Melaksanakan administrasi UPT perlindungan perempuan dan anak
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Gambar 2.1. Struktur Organisasi

**Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumbawa**



Gambar 2.2. Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa



**2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumbawa**

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian pada Bagian Umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa sampai dengan Tahun 2020, berikut disajikan kondisi dan status kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa yang akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa yaitu:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

No	Tingkat Pendidikan	ASN		NON ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SMA / Sederajat	9	10	3	2	24
2.	D3 / D4	3	4			7
3.	S1	10	17	3	4	34
4.	S2	2	3			5
		24	34	6	6	70

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan II	2	2	4
2.	Golongan III	24	22	46
3.	Golongan IV	3	3	6
		31	27	56

Tabel 2.3. Kondisi dan Analisa Kebutuhan Pegawai

NO	URAIAN	Kondisi Saat ini		Kebut uhan	+/-
		L	P		
1	Kepala	0	1	1	0
2	Sekretaris	1	0	1	0
3	Kepala Sub Bagian TU	1	0	1	0
4	Staf Umum dan Kepegawaian	2	2	17	-13
5	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	0	1	0
6	Staf Keuangan	2	1	5	-2
7	Kepala Sub Bagian Program	1	0	1	0
8	Staf Program	0	0	4	-4
9	Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	1	0	1	0
10	Kepala Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	0	1	1	0
11	Staf	0	0	3	-3
12	Kepala Seksi Jaminan Berkeluarga Berencana	0	1	1	0
13	Staf	1	0	3	-2
14	Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana	0	1	1	0
15	Staf	0	0	3	-3
16	Kepala Bidang Kesenjangan Gender Dan Peningkatan Kualitas Keluarga	0	1	1	0
17	Kepala Seksi Kesenjangan Gender	0	1	1	0
18	Staf	0	0	3	-3
19	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga	0	0	1	-1
20	Staf	0	0	3	-3

21	Kepala Seksi Data, Informasi Gender Dan Anak	0	1	1	0
22	Staf	0	0	3	-3
23	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Dan Pergerakan	0	1	1	0
24	Kepala Seksi Pengendalian Kependudukan	0	0	1	-1
25	Staf	0	0	3	-3
28	Kepala Seksi Data Kependudukan	0	1	1	0
27	Staf	0	0	3	-3
28	Kepala Seksi Advokasi Dan Penggerakan	0	1	1	0
29	Staf	0	0	3	-3
30	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak	0	1	1	0
31	Kepala Seksi Perlindungan Anak	1	0	1	0
32	Staf	0	1	3	-2
33	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak	0	1	1	0
34	Staf	0	1	3	-2
35	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan	0	1	1	0
36	Staf	0	0	3	-3
37	Kepala UPT	11	7	25	-7
38	KTU UPT	4	4	25	-17
Jumlah		26	29	133	-78

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa membutuhkan 133 orang ASN yang terdiri dari 83 orang ASN di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan 50 Orang di UPT, dari kebutuhan tersebut yang ada saat ini berjumlah 29 orang ASN di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan 26 orang ASN di UPT sehingga masih mengalami kekurangan tenaga sebanyak 78 orang ASN terdiri dari 54 orang untuk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan 24 orang untuk UPT.

2.2.2. Asset/Modal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah yang lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan penertiban asset melalui kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam DBP/ DBKP menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pencatatan barang milik daerah yang dikelola atau berada di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa disesuaikan dengan sebaran terhadap pemanfaatan asset/modal tersebut sebagaimana dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Berikut disajikan data asset/modal pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa

berdasarkan jenis asset sesuai data KIB Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa s.d. Tahun 2020 sebagai berikut :



Tabel 2.4. Kartu Inventaris Barang (KIB)
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Kesehatan
Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
NO. KODE LOKASI : 12.15.06.07.03.01.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan			
		Kode Barang 1.3.	Regis- ter				Hak	Sertifikat								
								Tanggal	Nomor							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	01.01.01.01.003	000001	0.00	2017	Jl. Durian	Hak Pengeblaan	7/16/2014	22	Kantor	Pembelian	0.00	Diukur BPN Tahun 2010 Mutasi dari Setda			
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	1,223.00	2010	Jl. Durian								Hibah	310,000.00	
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000002	1,116.00	2012	Depan kantor Capil (Sernu)	Hak Pakai							Pembelian	248,868.00	
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000003	963.00	1979	Kantor PPL Utan	Hak Pengelolaan							Hibah	50.00	Kanotor PPL Utan
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000004	453.00	2020	Jalan Durian, Kelurahan Uma Sima, Kabupaten Sumbawa	Hak Pakai							Hibah	0.00	UPTD Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa
									Jumlah Harga			558,918.00				



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Kesehatan
Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
NO. KODE LOKASI : 12.15.06.07.03.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.0103.05.010	Pompa Air	000002	Shimizu			2016						Pembelian	1,400.00	UPT KB Kecamatan Moyo Hulu
2	02.02.0101.003	Station Wagon	000001	Daihatsu / Xenia 1.3 XL			2010		MHKVJBA2JAK058735	DF40787	EA 1844 AA	H.00880814.0	Pembelian	143,450.00	Dropping dari DPKA
3	02.02.0101.003	Station Wagon	000002	Isuzu / Panther		Besi	2020						Hibah	0.00	Kendaraan Dinas Jabatan
4	02.02.0102.002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	000001	ISUZU		BESI	2014		MHYGDN41FI-412184		EA 8074 AA	L-10766397	Pembelian	359,964.00	
5	02.02.0103.007	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	000001	SUZUKI / APV BOX		BESI	2015		MHCNHR55EEJO5899 4	M058994	EA 7003 AA	L-04281656.0	Pembelian	170,600.00	MOBIL BOX DISTRIBUSI ALKON
6	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000001	Honda / Supra X	125		2008		MH1J1B81138K320220	JB81E- 1316535	EA 3677 AA	F 5689863.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Nurhidayat)
7	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000002	Honda / Supra X	125		2008		MH1J1B81138K295397	JB81E- 1292867	EA 3678 AA	F 5689828.0	Pembelian	14,000.00	DAK (M Sagir)
8	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000003	Honda / Supra X	125		2008		MH1J1B81138K312467	JB81E- 1309657	EA 3679 AA	F 5689819.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Herna Fitriani, A.Md)
9	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000004	Honda / Supra X	125		2008		MH1J1B81108K296541	JB81E- 1292787	EA 3680 AA	F 5689806.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Sri Bulan Jumiali)
10	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000005	Honda / Supra X	125		2008		MH1J1B81158K311096	JB81E- 1307906	EA 3681AA	F 5689847.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Wawan Satriawan)
11	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000006	Honda / Supra X	125		2008		MH1J1B811X8K290469	JB81E- 1287112	EA 3682 AA	F 5689820.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Muhammad Ali)

12	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000007	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81128K290451	JB81E-1287220	EA 3683 AA	F 5689814.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Sanolah)
13	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000008	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81178K295368	JB81E-1293215	EA 3684 AA	F 5689818.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Mastar, S.AP)
14	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000009	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81128K282107	JB81E-1278560	EA 3685 AA	F 5689817.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Darjo Amin)
15	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000010	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB811X8K282291	JB81E-1278708	EA 3686 AA	F 5689861.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Syarifuddin, ST)
16	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000011	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81148K311400	JB81E-1307508	EA 3687 AA	F 5689809.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Damhuri, S.AP)
17	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000012	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB811X8K321445	JB81E-1318067	EA 3688 AA	F 5689848.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Nurhayati)
18	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000013	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB811D8K328579	JB81E-1325046	EA 3689 AA	F 5689821.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Dahlia Nawawi, B.Sc)
19	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000014	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81198K320156	JB81E-1316637	EA 3690 AA	F 5689822.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Syarifuddin, ST)
20	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000015	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81128K313596	JB81E-1309830	EA 3691AA	F 5689843.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Sulastri)
21	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000016	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81158K313365	JB81E-1309694	EA 3692 AA	F 5689844.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Taufik Hidayat)
22	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000017	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81118K321429	JB81E-1318074	EA 3693 AA	F 5689840.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Sanapiah)
23	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000018	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81168K325346	JB81E-1321886	EA 3694 AA	F 5689864.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Sahra, SH)
24	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000019	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81198K321405	JB81E-1318050	EA 3695 AA	F 5689826.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Idawati)
25	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000020	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81118K300158	JB81E-1296753	EA 3696 AA	F 5689850.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Siti Hadijah)
26	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000021	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81178K309866	JB81E-1306429	EA 3697 AA	F 5689829.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Suwarjono)
27	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000022	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81178K313464	JB81E-1310094	EA 3698 AA	F 5689862.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Rahmawati)
28	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000023	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB811X8K295378	JB81E-1293257	EA 3699 AA	F 5689824.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Siti Aisyah)
29	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000024	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81198K300173	JB81E-1296720	EA 3700 AA	F 5689835.0	Pembelian	14,000.00	DAK (M. Kahiruddin)
30	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000025	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81178K295385	JB81E-1293220	EA 3701AA	F 5689834.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Andi Purwanto)

31	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000026	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB811B8K307687	JB81E-1304645	EA 3702 AA	F 5689832.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Sufiati)
32	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000027	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB811B8K313344	JB81E-1309788	EA 3703 AA	F 5689831.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Marjana)
33	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000028	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81128K313114	JB81E-1309886	EA 3704 AA	F 5689836.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Rusmiati M)
34	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000029	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81138K311016	JB81E-1307779	EA 3705 AA	F 5689837.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Muhammad Dachlan, A.Md)
35	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000031	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81108K296572	JB81E-1292752	EA 3707 AA	F 5689860.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Ernayati, S.AP)
36	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000033	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB811B8K317510	JB81E-1314124	EA 3709 AA	F 5689842.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Edy Julianto)
37	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000034	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81148K320114	JB81E-1316431	EA 3710 AA	F 5689801.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Laeli Febrianti, S.STP, M.Si)
38	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000035	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81138K296811	JB81E-1293403	EA 3711 AA	F 5689816.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Asma)
39	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000036	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81168K300168	JB81E-1296734	EA 3712 AA	F 5689846.0	Pembelian	14,000.00	DAK (M. Ayeb)
40	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000037	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81118K296807	JB81E-1293429	EA 3713 AA	F 5689845.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Sehan L)
41	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000038	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81178K300522	JB81E-1297171	EA 3714 AA	F 5689865.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Abdul Haris)
42	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000039	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81118K295351	JB81E-1293230	EA 3715 AA	F 5689823.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Suhadah)
43	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000040	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81198K313112	JB81E-1309870	EA 3716 AA	F 5689804.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Rahmatiawati)
44	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000041	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81108K311071	JB81E-1307931	EA 3717 AA	F 5689841.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Ratnawati, S.AP)
45	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000042	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81158K310031	JB81E-1306867	EA 3718 AA	F 5689849.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Novi Heryansyah)
46	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000043	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81148K313597	JB81E-1309818	EA 3719 AA	F 5689807.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Siti Asyiah, BA)
47	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000044	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81178K309592	JB81E-1306141	EA 3720 AA	F 5689808.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Mawaddah)
48	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000045	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81138K296792	JB81E-1293382	EA 3721 AA	F 5689838.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Madian)

49	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000046	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81198K320139	JB81E-1316604	EA 3722 AA	F 5689813.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Sri Wahyuni)
50	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000047	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81148K313390	JB81E-1309508	EA 3723 AA	F 5689810.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Wiwik Sartika, A.Md)
51	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000048	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81138K313445	JB81E-1310124	EA 3724 AA	F 5689812.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Zainuddin)
52	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000049	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81178K309575	JB81E-1305676	EA 3725 AA	F 5689811.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Hadijah)
53	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000050	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81178K296715	JB81E-1293329	EA 3726 AA	F 5689833.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Hawati)
54	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000051	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81128K323755	JB81E-1320377	EA 3727 AA	F 5689805.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Hamzah)
55	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000052	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81198K325051	JB81E-1321887	EA 3728 AA	F 5689803.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Lalu Subhan)
56	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000053	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81158K310742	JB81E-1307548	EA 3729 AA	F 5689815.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Radiah)
57	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000054	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81158K313592	JB81E-1309816	EA 3730 AA	F 5689825.0	Pembelian	14,000.00	DAK (M. Zukirjaya)
58	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000055	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81198K327552	JB81E-1324139	EA 3731AA	F 5689802.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Sadariah)
59	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000056	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81198K311330	JB81E-1308109	EA 3732 AA	F 5689827.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Sumarni)
60	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000057	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81128K352074	JB81E-1348668	EA 3736 AA	F 5690028.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Miskiniwati)
61	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000058	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB811X8K339959	JB81E-1336314	EA 3738 AA	F 5690010.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Five Wati)
62	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000059	Honda / Supra X	125	2008	MH1JB81178K360297	JB81E-1356706	EA 3737 AA	F 5690027.0	Pembelian	14,000.00	DAK (Keuangan)
63	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000060	Suzuki		BESI 2009	MH8EN125A9J-607929	F405-ID-607926	EA 3900 AA	G 0327928.0	Pembelian	16,000.00	Dody Hidayat Jaya Miharja, SE
64	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000061	Suzuki		BESI 2009	MH8EN125A9J-603347	F405-ID-603485	EA 3895 AA	G 0327941.0	Pembelian	16,000.00	Sahwan
65	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000062	Suzuki		BESI 2009	MH8EN125A9J-600333	F405-ID-600386	EA 3897 AA	G 0327939.0	Pembelian	16,000.00	Supri, S.Pt
66	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000063	Suzuki		BESI 2009	MH8EN125A9J-608285	F405-ID-608327	EA 3898 AA	G 0327938.0	Pembelian	16,000.00	Khaerun
67	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000064	Suzuki		BESI 2009	MH8EN125A9J-608378	F405-ID-607908	EA 3894 AA	G 0327942.0	Pembelian	16,000.00	Mei Wahyar, S.AP

68	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000065	Suzuki		BESI	2009	MH8EN125A9J-608395	F405-ID-607974	EA 3903 AA	G 03279310	Pembelian	16,000.00	Mukhlashien, S.AP
69	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000068	Suzuki		BESI	2009	MH8EN125A9J-608351	F405-ID-608343	EA 3902 AA	G 0327930.0	Pembelian	16,000.00	Satriawansyah
70	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000069	Suzuki		BESI	2009	MH8EN125A9J-600331	F405-ID-599973	EA 3901AA	G 0327929.0	Pembelian	16,000.00	Saruji
71	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000070	Honda / Supra X	125		2010	MH1JB811XAK628040	JB81E-16231B3	EA 4071AA	H.6850551.O	Pembelian	14,966.00	RIKA OKTARINI
72	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000071	Honda / Supra X	125		2010	MH1JB8112AK628422	JB81E-1623514	EA 4072 AA		Pembelian	14,966.00	PUTUT PRATOMO
73	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000072	Honda / Supra X	125		2010	MH1JB8113AK630650	JB81E-1626014	4073	H.6850549.O	Pembelian	14,966.00	ADI PUDDIN SYAM
74	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000073	Honda / Supra X	125		2011	MH1JB8110BK712076	JB81E-1708144	4090	1.2215149.O	Pembelian	16,750.00	HENNY ANDARESNI MARTIANENGTIA S
75	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000074	Honda / Supra X	125		2011	MH1JB88113BK690042	JB81E-686269	EA 4091AA		Pembelian	16,750.00	M DEDI RAHMANTO
76	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000075	Honda / Supra X	125		2011	MH1JB8113BK706627	JB 1E-1702649	EA 4092 AA	1.2215152.O	Pembelian	16,750.00	NURJENA
77	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000076	Honda / Supra X	125		2011	MH1JB811	JB81E-1769555	EA 4093 AA		Pembelian	16,750.00	SEPTI RIZAL AZIS
78	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000087	Honda / Win	100	Besi	1990	HA194-74689	HAE-2075445	EA 9892 AA		Pembelian	1,559.00	
79	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000098 s/d 000105	VIAR / Trail	250		2013					Pembelian	236,362.40	
			000098	VIAR / Trail	250		2013			EA 2101 AA		Pembelian	236,362.40	
			000099	VIAR / Trail	250		2013			EA 2103 AA		Pembelian	236,362.40	
			000100	VIAR / Trail	250		2013			EA 2105 AA		Pembelian	236,362.40	
			000101	VIAR / Trail	250		2013			EA 2106 AA		Pembelian	236,362.40	
			000102	VIAR / Trail	250		2013			EA 2107 AA		Pembelian	236,362.40	
			000103	VIAR / Trail	250		2013			EA 2108 AA		Pembelian	236,362.40	
			000104	VIAR / Trail	250		2013			EA 2109 AA		Pembelian	236,362.40	
			000105	VIAR / Trail	250		2013			EA 2110 AA		Pembelian	236,362.40	
			000106 s/d 000110	Yamaha / Jupiter Z	125		2013					Pembelian	104,176.50	
				106 Yamaha / Jupiter Z	125		2013			EA 2096 AA		Pembelian	104,176.50	

				107	Yamaha / Jupiter Z	125	2018		EA 2097 AA	Pembelian	104,176.50			
				108	Yamaha / Jupiter Z	125	2018		EA 2098 AA	Pembelian	104,176.50			
				109	Yamaha / Jupiter Z	125	2018		EA 2099 AA	Pembelian	104,176.50			
			000111	110	Yamaha / Jupiter Z	125	2018			Pembelian	104,176.50			
					Honda / Vario 125 eSP		2019			Pembelian	22,330.10	Motor Perlindungan Perempuan dan Anak		
82	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000112 s/d 000123		Honda / Vario		2020			Pembelian	339,571.20	Sepeda Motor + Karoseri + Honor		
82	02.02.0104.001	Sepeda Motor		112	Honda / Vario		2020		EA 4851 AA	Pembelian	339,571.20	Sepeda Motor + Karoseri + Honor		
				112	Honda / Vario		2020		EA 4856 AA	Pembelian	339,571.20	Sepeda Motor + Karoseri + Honor		
				112	Honda / Vario		2020		EA 4849 AA	Pembelian	339,571.20	Sepeda Motor + Karoseri + Honor		
				112	Honda / Vario		2020		EA 4847 AA	Pembelian	339,571.20	Sepeda Motor + Karoseri + Honor		
				112	Honda / Vario		2020		EA 4859 AA	Pembelian	339,571.20	Sepeda Motor + Karoseri + Honor		
				112	Honda / Vario		2020		EA 4855 AA	Pembelian	339,571.20	Sepeda Motor + Karoseri + Honor		
				112	Honda / Vario		2020		EA 4853 AA	Pembelian	339,571.20	Sepeda Motor + Karoseri + Honor		
				112	Honda / Vario		2020		EA 4852 AA	Pembelian	339,571.20	Sepeda Motor + Karoseri + Honor		
				112	Honda / Vario		2020		EA 4850 AA	Pembelian	339,571.20	Sepeda Motor + Karoseri + Honor		
				112	Honda / Vario		2020		EA 4857 AA	Pembelian	339,571.20	Sepeda Motor + Karoseri + Honor		
				112	Honda / Vario		2020		EA 4846 AA	Pembelian	339,571.20	Sepeda Motor + Karoseri + Honor		
				112	Honda / Vario		2020		EA 4848 AA	Pembelian	339,571.20	Sepeda Motor + Karoseri + Honor		
83	02.02.0106.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	000001		Mitsubishi / Strada		2009	MMBJNKB709D013915	4M40UAB 3865	EA 8065 AA	G.0721993.0	Pembelian	536,250.00	Mobil Unit Penerangan DULU EA 9094
84	02.02.0106.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	000002		Mitsubishi		2010	MHMFETJP9AK002414	4D34T-F75987	EA 9056 AA	H.05856462	Pembelian	534,600.00	Mobil Unit Pelayanan
85	02.02.0106.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	000003		Daihatsu / Luxio		2018			B 1756 PQT		Hibah	232,950.00	Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak
86	02.02.02.01013	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	000001		-		2011					Pembelian	1,725.00	Troli Pengangkut Barang

87	02.04.0104.006	Alat Penyimpanan Hasil Pertanian lainnya	000001 s/d 000026	-		2016						Pembelian	104,165.88	BKB Kit
88	02.04.0104.006	Alat Penyimpanan Hasil Pertanian lainnya	000027 s/d 000048	-		2016						Pembelian	91,665.97	BKB Kit
89	02.04.0104.006	Alat Penyimpanan Hasil Pertanian lainnya	000049	-		2016						Pembelian	4,166.64	BKB Kit
90	02.05.0101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	000002 s/d 000003	Royal 26		2009						Pembelian	8,090.00	
91	02.05.0101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	000004	Olivette		2011						Pembelian	4,815.00	
92	02.05.0101012	mesin ketik lainnya (dst)	000001 s/d 000002	-		2008						Pembelian	6,223.00	Mesin Ketik Manual 27 Inchi
93	02.05.0104.001	Lemari Besi/Metal	000001	-		2020						Pembelian	2,300.00	Lemari Arsip
94	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000001 s/d 000010	-		2013						Pembelian	34,787.50	Pengadaan Tahun 2013
95	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000011 s/d 000013	-		2016						Pembelian	11,998.80	
96	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000014	-		2017						Pembelian	4,130.00	
97	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000043	-		2008						Pembelian	1,454.20	Lemari Arsip
98	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000044	-		2010						Pembelian	1,897.50	Lokal
99	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000045	-		2011						Pembelian	1,997.40	Buffet
100	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000046 s/d 000053	-		2011						Pembelian	22,808.00	Masing-Masing 2 (Dua) Di Kecamatan Moyo Utara, Lopok, Maronge, Dan Rhee
101	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000054 s/d 000056	-		2011						Pembelian	9,300.00	Di Gudang Badan KBPP Kabupaten Sumbawa
102	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000057 s/d 000066	-		2012						Pembelian	25,000.00	
103	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000067 s/d 000068	-		2015						Pembelian	7,999.20	KECAMATAN LANTUNG
104	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000069 s/d 000070	-		2015						Pembelian	7,999.20	KECAMATAN LENANGGUAR

105	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000071 s/d 000072	-		2015					Pembelian	7,999.20	KECAMATAN EMPANG
106	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000073 s/d 000074	-		2015					Pembelian	7,999.20	KECAMATAN ALAS BARAT
107	02.05.0104.004	Rak Kayu	000004 s/d 000007	-		2011					Pembelian	10,600.00	Di Gudang Badan KBPP Kabupaten Sumbawa
108	02.05.0104.004	Rak Kayu	000008 s/d 000011	-		2011					Pembelian	12,232.00	Masing-Masing Di Kecamatan Moyo Utara, Lopok, Maronge, Dan Rhee
109	02.05.0104.004	Rak Kayu	000012 s/d 000014	-		2014					Pembelian	9,358.80	
110	02.05.0104.004	Rak Kayu	000015	-		2015					Pembelian	3,119.60	KECAMATAN LANTUNG
111	02.05.0104.004	Rak Kayu	000016	-		2015					Pembelian	3,119.60	KECAMATAN LENANGGUAR
112	02.05.0104.004	Rak Kayu	000017	-		2015					Pembelian	3,119.60	KECAMATAN EMPANG
113	02.05.0104.004	Rak Kayu	000018	-		2015					Pembelian	3,119.60	KECAMATAN ALAS BARAT
114	02.05.0104.004	Rak Kayu	000019 s/d 000023	-		2012					Pembelian	12,500.00	
115	02.05.0104.004	Rak Kayu	000024 s/d 000028	-		2013					Pembelian	15,590.30	Rak Arsip (Pengadaan Tahun 2013)
116	02.05.0104.004	Rak Kayu	000029 s/d 000031	-		2016					Pembelian	9,358.80	
117	02.05.0104.004	Rak Kayu	000032	-		2020					Pembelian	2,000.00	Rak Buku
118	02.05.0104.005	Filing Cabinet Besi	000006 s/d 000010	Brother		2009					Pembelian	7,905.00	
119	02.05.0104.005	Filing Cabinet Besi	000011 s/d 000012	Brother		2011					Pembelian	3,329.20	
120	02.05.0104.005	Filing Cabinet Besi	000013	-		2018					Pembelian	2,550.00	Filing Cabinet
121	02.05.0104.007	Brandkas	000001	-		1991					Pembelian	296.00	

122	02.05.0104.007	Brandkas	000002	-			2010					Pembelian	436.40	
123	02.05.0105.003	Papan Visual/Papan Nama	000001	-			2011					Pembelian	1250.00	Di Gudang Badan KBPP Kabupaten Sumbawa
124	02.05.0105.005	White Board	000034 s/d 000037	-			2011					Pembelian	6,328.00	Masing-Masing Di Kecamatan Moyo Utara, Lopok, Maronge, dan Rhee
125	02.05.0105.005	White Board	000038 s/d 000042	-			2012					Pembelian	9,500.00	
126	02.05.0105.005	White Board	000043 s/d 000047	-			2013					Pembelian	5,171.10	Pengadaan Tahun 2013
127	02.05.0105.005	White Board	000080 s/d 000082	MAGNETIK			2014					Pembelian	3,148.20	
128	02.05.0105.005	White Board	000083	-			2015					Pembelian	770.00	KECAMATAN LANTUNG
129	02.05.0105.005	White Board	000084	-			2015					Pembelian	770.00	KECAMATAN LENANGGUAR
130	02.05.0105.005	White Board	000085	-			2015					Pembelian	770.00	KECAMATAN EMPANG
131	02.05.0105.005	White Board	000086	-			2015					Pembelian	770.00	KECAMATAN ALAS BARAT
132	02.05.0105.005	White Board	000087 s/d 000089	-			2016					Pembelian	2,475.00	
133	02.05.0105.012	Mesin Absensi	000001	Innovation			2013					Pembelian	4,500.00	Pengadaan Tahun 2013
134	02.05.0105.043	LCD Projector/Infocus	000001s/d 000005	-			2020					Pembelian	84,958.50	
135	02.05.0105.076	Papan Nama Instansi	000001	-			2006					Pembelian	1000.00	
136	02.05.0105.077	Papan Pengumuman	000001s/d 000007	-			2011					Pembelian	1925.00	Papan Informasi PPKBD
137	02.05.0105.077	Papan Pengumuman	000008 s/d 000012	-			2013					Pembelian	3,750.00	Papan Informasi PPKBD (Pengadaan Tahun 2013)

138	02.05.0105.077	Papan Pengumuman	000013 s/d 000016	-			2013					Pembelian	3,782.40	Papan Informasi KSI (Pengadaan Tahun 2013)
139	02.05.0105.077	Papan Pengumuman	000017	-			2013					Pembelian	750.00	Papan Informasi PPKBD (Pengadaan Tahun 2013)
140	02.05.0105.088	Alat Kantor Lainnya	000002 s/d 000013	-			2011					Pembelian	5,700.00	Pallet
141	02.05.0105.088	Alat Kantor Lainnya	000572 s/d 000606	-			2017					Pembelian	157,465.00	Lemari Penyimpanan Kit/ Alokon
142	02.05.02.01003	Kursi BesiMetal	000001	-			2018					Pembelian	7,700.00	Kursi Tunggu Stainless
143	02.05.02.01008	Meja Rapat	000023 s/d 000026	-			2011					Pembelian	7,384.00	Masing-Masing Di Kecamatan Moyo Utara, Lopok, Maronge, dan Rhee
144	02.05.02.01008	Meja Rapat	000027 s/d 000031	-			2012					Pembelian	7,500.00	
145	02.05.02.01008	Meja Rapat	000032 s/d 000038	-		Kayu	2013					Pembelian	18,149.60	Pengadaan Tahun 2013
146	02.05.02.01008	Meja Rapat	000039	-			2015					Pembelian	2,999.98	KECAMATAN LANTUNG
147	02.05.02.01008	Meja Rapat	000040	-			2015					Pembelian	2,999.98	KECAMATAN LENANGGUAR
148	02.05.02.01008	Meja Rapat	000041	-			2015					Pembelian	2,999.98	KECAMATAN EMPANG
149	02.05.02.01008	Meja Rapat	000042	-			2015					Pembelian	2,999.98	KECAMATAN ALAS BARAT
150	02.05.02.01008	Meja Rapat	000043 s/d 000045	-			2016					Pembelian	8,999.93	
151	02.05.02.01024	Meja 12 Biro	000004 s/d 000012	-			2011					Pembelian	9,920.00	Meja 12 Biro
152	02.05.02.01024	Meja 12 Biro	000013 s/d 000017	-		Kayu	2013					Pembelian	5,885.00	Meja Kerja 12 Biro (Pengadaan Tahun 2013)

153	02.05.02.01024	Meja 12 Biro	000018 s/d 000019	-			2015						Pembelian	3,652.00	KECAMATAN LANTUNG
154	02.05.02.01024	Meja 12 Biro	000020 s/d 000021	-			2015						Pembelian	3,652.00	KECAMATAN LENANGGUAR
155	02.05.02.01024	Meja 12 Biro	000022 s/d 000023	-			2015						Pembelian	3,652.00	KECAMATAN EMPANG
156	02.05.02.01024	Meja 12 Biro	000024 s/d 000025	-			2015						Pembelian	3,652.00	KECAMATAN ALAS BARAT
157	02.05.02.01024	Meja 12 Biro	000026 s/d 000031	-			2016						Pembelian	10,956.00	
158	02.05.02.01030	Kursi Rapat	000001s/d 000075	-			2012						Pembelian	42,000.00	
159	02.05.02.01030	Kursi Rapat	000076	-			2015						Pembelian	649.00	KECAMATAN LANTUNG
160	02.05.02.01030	Kursi Rapat	000077	-			2015						Pembelian	649.00	KECAMATAN LENANGGUAR
161	02.05.02.01030	Kursi Rapat	000078	-			2015						Pembelian	649.00	KECAMATAN EMPANG
162	02.05.02.01030	Kursi Rapat	000079	-			2015						Pembelian	649.00	KECAMATAN ALAS BARAT
163	02.05.02.01030	Kursi Rapat	000080 s/d 000093	-			2015						Pembelian	9,086.00	KECAMATAN LANTUNG
164	02.05.02.01030	Kursi Rapat	000094 s/d 000107	-			2015						Pembelian	9,086.00	KECAMATAN LENANGGUAR
165	02.05.02.01030	Kursi Rapat	000108 s/d 000121	-			2015						Pembelian	9,086.00	KECAMATAN EMPANG
166	02.05.02.01030	Kursi Rapat	000122 s/d 000135	-			2015						Pembelian	9,086.00	KECAMATAN ALAS BARAT
167	02.05.02.01030	Kursi Rapat	000136 s/d 000180	-			2016						Pembelian	24,200.00	
168	02.05.02.01030	Kursi Rapat	000181	-			2016						Pembelian	550.00	
169	02.05.02.01030	Kursi Rapat	000182 s/d 000201	-	Chitose		2018						Pembelian	9,578.00	
170	02.05.02.01031	Kursi Tamu	000001	-			2006						Pembelian	3,100.00	Kursi Tamu Ukir
171	02.05.02.01031	Kursi Tamu	000002 s/d 000006	-			2012						Pembelian	38,000.00	

172	02.05.02.01032	Kursi Putar	000001 s/d 000005	-			2013					Pembelian	4,857.60	Kursi Kerja Roda (Pengadaan Tahun 2013)
173	02.05.02.01032	Kursi Putar	000006 s/d 000007	-			2015					Pembelian	2,750.00	KECAMATAN LANTUNG
174	02.05.02.01032	Kursi Putar	000008 s/d 000009	-			2015					Pembelian	2,750.00	KECAMATAN LENANGGUAR
175	02.05.02.01032	Kursi Putar	000010 s/d 000011	-			2015					Pembelian	2,750.00	KECAMATAN EMPANG
176	02.05.02.01032	Kursi Putar	000012 s/d 000013	-			2015					Pembelian	2,750.00	KECAMATAN ALAS BARAT
177	02.05.02.01032	Kursi Putar	000014 s/d 000019	-			2016					Pembelian	10,296.00	
178	02.05.02.01039	Meja Komputer	000003	-			2015					Pembelian	41140	KECAMATAN ALAS
179	02.05.02.01039	Meja Komputer	000004	-			2015					Pembelian	41140	KECAMATAN LUNYUK
180	02.05.02.01039	Meja Komputer	000005	-			2015					Pembelian	41140	KECAMATAN LAPE
181	02.05.02.01039	Meja Komputer	000006	-			2015					Pembelian	41140	KECAMATAN LABANGKA
182	02.05.02.01039	Meja Komputer	000007	-			2015					Pembelian	41140	KECAMATAN PLAMPANG
183	02.05.02.01039	Meja Komputer	000008	-			2015					Pembelian	41140	KECAMATAN LABUHAN BADAS
184	02.05.02.01041	Partisi	000001	-		Kayu	2013					Pembelian	40,000.00	1Paket (Pengadaan Tahun 2013)
185	02.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	000001	-			2011					Pembelian	2,170.00	Di Gudang Badan KBPP Kabupaten Sumbawa
186	02.05.02.04.003	A.C. Window	000001	-	Panasonic		2009					Pembelian	4,900.00	
187	02.05.02.04.003	A.C. Window	000002	-	Panasonic / 1 PK		2011					Pembelian	4,250.00	Di Gudang Badan KBPP Kabupaten Sumbawa
188	02.05.02.04.003	A.C. Window	000003	-	Panasonic	3/4 PK	2011					Pembelian	4,000.00	Di Gudang Badan KBPP Kabupaten Sumbawa

189	02.05.02.04.003	A.C. Window	000004	LG			2013					Pembelian	4,943.40	Pengadaan Tahun 2013
190	02.05.02.04.004	A.C. Split	000002	-	1PK		2007					Pembelian	3,341.00	DAU
191	02.05.02.04.004	A.C. Split	000003 s/d 000007	Polytron			2017					Pembelian	21,200.00	
192	02.05.02.04.004	A.C. Split	000008	Polytron			2018					Pembelian	5,450.00	
193	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000005	Maspion			2009					Pembelian	596.00	Kipas Angin Berdiri
194	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000006 s/d 000017	-			2011					Pembelian	6,900.00	Masing-Masing Di Kecamatan Moyo Utara, Lopok, Maronge, Dan Rhee
195	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000018 s/d 000032	-			2012					Pembelian	10,200.00	
196	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000033 s/d 000037	-			2013					Pembelian	4,730.00	Kipas Angin Gantung (Pengadaan Tahun 2013)
197	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000038 s/d 000040	PANASONIC / F-EY1511			2014					Pembelian	2,930.40	
198	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000041	-			2015					Pembelian	1,305.00	KECAMATAN LANTUNG
199	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000042	-			2015					Pembelian	1,305.00	KECAMATAN LENANGGUAR
200	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000043	-			2015					Pembelian	1,305.00	KECAMATAN EMPANG
201	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000044	-			2015					Pembelian	1,305.00	KECAMATAN ALAS BARAT
202	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000045 s/d 000050	Panasonic			2016					Pembelian	7,830.00	
203	02.05.02.04.007	Exhaust Fan	000001 s/d 000003	-			2011					Pembelian	2,865.00	Di Gudang BKBPP Kabupaten Sumbawa
204	02.05.02.04.007	Exhaust Fan	000004 s/d 000015	-			2011					Pembelian	11,400.00	Masing-Masing Di Kecamatan Moyo Utara, Lopok, Maronge, dan Rhee

205	02.05.02.04.007	Exhaust Fan	000016 s/d 000030	-	2012					Pembelian	11,250.00	
206	02.05.02.04.007	Exhaust Fan	000031 s/d 000045	-	2013					Pembelian	54,862.50	Pengadaan Tahun 2013
207	02.05.02.04.007	Exhaust Fan	000046 s/d 000057	PANASONIC / FV40AFU	2014					Pembelian	21,114.10	
208	02.05.02.04.007	Exhaust Fan	000058 s/d 000061	-	2015					Pembelian	10,680.00	KECAMATAN LANTUNG
209	02.05.02.04.007	Exhaust Fan	000062 s/d 000065	-	2015					Pembelian	10,680.00	KECAMATAN LENANGGUAR
210	02.05.02.04.007	Exhaust Fan	000066 s/d 000069	-	2015					Pembelian	10,680.00	KECAMATAN EMPANG
211	02.05.02.04.007	Exhaust Fan	000070 s/d 000073	-	2015					Pembelian	10,680.00	KECAMATAN ALAS BARAT
212	02.05.02.04.007	Exhaust Fan	000074 s/d 000085	Panasonic	2016					Pembelian	32,040.00	
213	02.05.02.06.002	Televisi	000002	SHARP / 32"	2015					Pembelian	6,090.00	
214	02.05.02.06.012	Wireless	000011	TOA	2009					Pembelian	13,700.00	
215	02.05.02.06.014	Microphone	000001 s/d 000002	-	2018					Pembelian	805.20	
216	02.05.02.06.015	Microphone Floor Stand	000001	-	2018					Pembelian	248.20	
217	02.05.02.06.021	Camera Video	000001	Canon	2009					Pembelian	4,850.00	Kamera Digital
218	02.05.02.06.021	Camera Video	000002	Nikon	2013					Pembelian	10,070.00	Pengadaan Tahun 2013
219	02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	000001	-	2011					Pembelian	1,385.00	Di Gudang Badan KBPP Kabupaten Sumbawa
220	02.05.02.06.069	Lampu	000001 s/d 000005	Krisbow	2013					Pembelian	4,977.50	Pengadaan Tahun 2013
221	02.05.02.06.069	Lampu	000006 s/d 000008	KRISBOW / KW 1801048	2014					Pembelian	2,999.70	
222	02.05.02.06.069	Lampu	000009	KRISBOW / KW 1801048	2015					Pembelian	1,220.00	KECAMATAN LANTUNG
223	02.05.02.06.069	Lampu	000010	KRISBOW / KW 1801048	2015					Pembelian	1,220.00	KECAMATAN LENANGGUAR

224	02.05.02.06.069	Lampu	000011	KRISBOW / KW 3801048		2015					Pembelian	1,220.00	KECAMATAN EMPANG
225	02.05.02.06.069	Lampu	000012	KRISBOW / KW 3801048		2015					Pembelian	1,220.00	KECAMATAN ALAS BARAT
226	02.05.02.06.069	Lampu	000013 s/d 000018	-		2016					Pembelian	1,500.00	
227	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000001	-		2011					Pembelian	372.00	Tempat Sampah
228	02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000001	-		2018					Pembelian	3,000.00	
229	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000001 s/d 000010	-		2012					Pembelian	14,000.00	
230	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000056	-	Kayu	2013					Pembelian	1,950.00	Pengadaan Tahun 2013
231	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000343 s/d 000348	KAYU SETARA KELAS II		2014					Pembelian	7,062.00	
232	02.05.03.02.014	Meja Rapat Pejabat lainnya	000001 s/d 000003	KAYU SETARA KELAS II		2014					Pembelian	8,998.90	
233	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000001	-		2013					Pembelian	2,215.00	Pengadaan Tahun 2013
234	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000002	-		2016					Pembelian	3,920.00	
235	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000002	-		2013					Pembelian	2,215.00	Kursi Kerja Sekretaris (Pengadaan Tahun 2013)
236	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000003 s/d 000006	-		2016					Pembelian	8,800.00	
237	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000008	-		2016					Pembelian	2,200.00	
238	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001 s/d 000004	-		2011					Pembelian	4,384.00	Masing-Masing Di Kecamatan Moyo Utara, Lopok, Maronge, Dan Rhee
239	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000005 s/d 000009	-		2020					Pembelian	7,380.00	
240	02.05.03.03.007	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	000001 s/d 000004	-		2011					Pembelian	4,180.00	Masing-Masing Di Kecamatan Moyo Utara, Lopok, Maronge, Dan Rhee

241	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000066	-		2011					Pembelian	1.000.00	Di Gudang Badan KBPP Kabupaten Sumbawa
242	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000067 s/d 000076	-		2012					Pembelian	9.000.00	
243	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000077 s/d 000086	-		2013					Pembelian	6.150.00	Pengadaan Tahun 2013
244	02.05.03.03.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	000001 s/d 000006	-		2014					Pembelian	6.405.30	
245	02.05.03.04.007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	000001 s/d 000045	-		2014					Pembelian	29.205.00	
246	02.05.03.05.005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	000001 s/d 000060	-		2011					Pembelian	45.180.00	Masing-Masing Di Kecamatan Moyo Utara, Lopok, Maronge, Dan Rhee
247	02.05.03.05.005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	000061 s/d 000135	-		2013					Pembelian	46.860.00	Pengadaan Tahun 2013
248	02.05.03.05.005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	000136 s/d 000140	-		2016					Pembelian	2.575.00	
249	02.05.03.06.004	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	000001	SOFA		2014					Pembelian	5.900.00	
250	02.05.03.06.005	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	000001	-		2020					Pembelian	7.600.00	
251	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000001 s/d 000006	-		2014					Pembelian	23.997.61	
252	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000007	-		2016					Pembelian	3.000.00	
253	02.06.0101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000001	-		2015					Pembelian	82170	KECAMATAN ALAS
254	02.06.0101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000002	-		2015					Pembelian	82170	KECAMATAN LUNYUK
255	02.06.0101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000003	-		2015					Pembelian	82170	KECAMATAN LABUHAN BADAS

256	02.06.0101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000004	-		2015					Pembelian	82170	KECAMATAN LAPE
257	02.06.0101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000005	-		2015					Pembelian	82170	KECAMATAN LABANGKA
258	02.06.0101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000006	-		2015					Pembelian	82170	KECAMATAN PLAMPANG
259	02.06.0101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000007 s/d 000012	-		2016					Pembelian	5,502.75	
260	02.06.0102.105	Layar Film/Projector	000001	Infocus		2017					Pembelian	15,200.00	
261	02.06.02.01004	Telephone Mobile	000001	Asus		2017					Pembelian	4,950.00	
262	02.06.02.01004	Telephone Mobile	000001 s/d 000067	Asus / Zenpad 8.0		2016					Pembelian	225,966.48	Tablet
263	02.06.02.06.001	Publik Address (Lapangan)	000010 s/d 000018	Krezt		2011					Pembelian	98,883.00	Di 9 (Sembilan) Kecamatan
264	02.06.02.06.001	Publik Address (Lapangan)	000019 s/d 000023	-		2012					Pembelian	54,725.00	
265	02.06.02.06.001	Publik Address (Lapangan)	000024 s/d 000027	YTS		2014					Pembelian	31,000.00	
266	02.06.02.06.001	Publik Address (Lapangan)	000028	YTS		2015					Pembelian	7,750.00	KABUPATEN
267	02.06.02.06.001	Publik Address (Lapangan)	000029	YTS		2015					Pembelian	7,750.00	KECAMATAN BATU LANTEH
268	02.06.02.06.001	Publik Address (Lapangan)	000030	YTS		2015					Pembelian	7,750.00	KECAMATAN ALAS BARAT
269	02.06.02.06.001	Publik Address (Lapangan)	000031	YTS		2015					Pembelian	7,750.00	KECAMATAN ORONG TELU
270	02.06.02.06.001	Publik Address (Lapangan)	000032	YTS		2015					Pembelian	7,750.00	KECAMATAN LANTUNG
271	02.06.02.06.001	Publik Address (Lapangan)	000033	YTS		2015					Pembelian	7,750.00	KECAMATAN LAPE
272	02.06.02.06.007	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	000001 s/d 000035	-		2018					Pembelian	160,699.00	KIE Kit KKB
273	02.06.02.06.007	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	000071 s/d 000094	-		2019					Pembelian	104,702.40	KIE Kit
274	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	000026 s/d 000100	-		2008					Pembelian	243,000.00	IUD Kit
275	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	003936	-		2008					Pembelian	2,584.62	Sterilisator Uap Double Rack

276	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	003956	-	2008							Pembelian	1,681.26	Needle Destroyer
277	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	003957 s/d 003980	-	2009							Pembelian	172,310.52	Obgyn Bed
278	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	003981 s/d 004027	-	2009							Pembelian	167,292.44	Implant Kit
279	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004028 s/d 004029	-	2009							Pembelian	7,058.00	Implant Kit
280	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004030 s/d 004033	-	2011							Pembelian	13,944.00	Set Sitje
281	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004034 s/d 004041	-	2011							Pembelian	95,900.00	Obgyn Bed
282	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004042 s/d 004054	-	2012							Pembelian	143,870.00	Obgyn Bed
283	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004055 s/d 004060	-	2012							Pembelian	36,470.50	IUD Kit
284	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004061 s/d 004065	-	2012							Pembelian	16,249.50	Implant Kit
285	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004090 s/d 004127	-	2008							Pembelian	98,215.38	Sterilisator Uap Double Rack
286	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004128 s/d 004145	-	2008							Pembelian	30,262.74	Needle Destroyer
287	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004146	-	2015							Pembelian	10,574.30	OBGYN BED KECAMATAN MOYO HULU
288	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004147	-	2015							Pembelian	10,574.30	OBGYN BED KECAMATAN UTAN
289	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004148	-	2015							Pembelian	10,574.30	OBGYN BED KECAMATAN TARANO
290	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004149	-	2015							Pembelian	10,574.30	OBGYN BED KECAMATAN PLAMPANG
291	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004150	-	2015							Pembelian	10,574.30	OBGYN BED KECAMATAN EMPANG

292	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004151	-			2015					Pembelian	10,574.30	OBGYN BED KECAMATAN MOYO HILIR
293	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004152	-			2015					Pembelian	4,000.00	IUD KIT KECAMATAN MOYO HULU
294	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004153	-			2015					Pembelian	4,000.00	IUD KIT KECAMATAN UTAN
295	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004154	-			2015					Pembelian	4,000.00	IUD KIT KECAMATAN TARANO
296	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004155	-			2015					Pembelian	4,000.00	IUD KIT KECAMATAN PLAMPANG
297	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004156	-			2015					Pembelian	4,000.00	IUD KIT KECAMATAN LAPE
298	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004157	-			2015					Pembelian	4,000.00	IUD KIT KECAMATAN LABANGKA
299	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004163	-			2017					Pembelian	12,375.00	Obgyn Bed
300	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004168 s/d 004170	-			2017					Pembelian	12,210.00	IUD Kit
301	02.07.0103.015	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	004172 s/d 004175	-			2017					Pembelian	11,000.00	Implant Removal Kit
302	02.07.0105.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	000004	-			2016					Pembelian	12,000.00	Obgyn Bed
303	02.08.0141004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000001	-			2011					Pembelian	1,315.00	Di Gudang Badan KBPP Kabupaten Sumbawa
304	02.08.0141.192	Personal Computer	000001	-			2020					Pembelian	19,470.00	+ Honorarium PjPHP & Pejabat Pengadaan
305	02.08.0141.192	Personal Computer	000002 s/d 000003	-			2020					Pembelian	29,040.00	
306	02.10.0101001	Mainframe (Komputer Jaringan)	000001	-			2007					Pembelian	13,000.00	DAU

307	02.10.0102.001	P.C Unit	000004 s/d 000005	LG	2008							Pembelian	18,000.00	DAU
308	02.10.0102.001	P.C Unit	000006	Samsung	2009							Pembelian	8,850.00	
309	02.10.0102.001	P.C Unit	000007	LG	2011							Pembelian	10,850.00	
310	02.10.0102.001	P.C Unit	000011	ACER / INTEL CORE	2014							Pembelian	10,000.00	
311	02.10.0102.001	P.C Unit	000012	HP / PAVILION TOUCH SMART 27- n106d A10	2015							Pembelian	31,000.00	+ UPS APC BX800 Li-MS
312	02.10.0102.001	P.C Unit	000013	LENOVO	2015							Pembelian	10,598.50	KECAMATAN ALAS
313	02.10.0102.001	P.C Unit	000014	LENOVO	2015							Pembelian	10,598.50	KECAMATAN LENANGGUAR
314	02.10.0102.001	P.C Unit	000015	LENOVO	2015							Pembelian	10,598.50	KECAMATAN LABUHAN BADAS
315	02.10.0102.001	P.C Unit	000016	LENOVO	2015							Pembelian	10,598.50	KECAMATAN LAPE
316	02.10.0102.001	P.C Unit	000017	LENOVO	2015							Pembelian	10,598.50	KECAMATAN LABANGKA
317	02.10.0102.001	P.C Unit	000018	LENOVO	2015							Pembelian	10,598.50	KECAMATAN PLAMPANG
318	02.10.0102.001	P.C Unit	000019 s/d 000024	-	2016							Pembelian	68,310.00	
319	02.10.0102.001	P.C Unit	000025 s/d 000035	Lenovo	2017							Pembelian	165,000.00	
320	02.10.0102.002	Lap Top	000003	ASUS / A455LF	2015							Pembelian	11,700.00	
321	02.10.0102.002	Lap Top	000004	HP / NOTEBOOK 14-R120TX	2015							Pembelian	11,698.50	SISTEM OPERASI WINDOWS 8
322	02.10.0102.002	Lap Top	000005	Toshiba	2017							Pembelian	10,036.36	
323	02.10.0102.002	Lap Top	000006	Dell	2017							Pembelian	12,000.00	
324	02.10.0102.002	Lap Top	000007	Asus / X550V	2017							Pembelian	15,500.00	
325	02.10.0102.002	Lap Top	000008	ASUS	2018							Pembelian	14,950.00	
326	02.10.0102.002	Lap Top	000009 s/d 000010	Asus / A442U	2019							Pembelian	24,000.00	
327	02.10.0102.002	Lap Top	000011	ASUS	2020							Pembelian	14,800.00	
328	02.10.0102.002	Lap Top	000012	Asus	2020							Pembelian	11,286.00	

329	02.10.0102.003	Note Book	000001s/d 000003	Asus		2009					Pembelian	52,050.00	
330	02.10.0102.003	Note Book	000004	Toshiba		2009					Pembelian	16,950.00	
331	02.10.0102.003	Note Book	000005 s/d 000031	Toshiba / Satelit L645		2010					Pembelian	231,267.74	
332	02.10.0102.003	Note Book	000034	Asus / Intel Core i7-2630QM	4GB DDR3 750GB HDD	2012					Pembelian	13,800.00	
333	02.10.0102.003	Note Book	000036	ACER / AMD QUAD CORE PROCESSOR		2014					Pembelian	6,000.00	
334	02.10.02.01012	Hard Disk	000001	TOSHIBA / CANVIO SIRIPLE 3.0	1 TERA	2013					Pembelian	1,265.90	Pengadaan Tahun 2013
335	02.10.02.02.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	000001	Fujitsu / S1300i		2019					Pembelian	5,614.00	
336	02.10.02.02.017	Peralatan Minikomputer lainnya	000026	Acer		2013					Pembelian	950.00	Baterai Laptop (Pengadaan Tahun 2013)
337	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	HP / DESKJET LAK ADVANTAGE 2545		2015					Pembelian	1,165.00	
338	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	CANON / PIXMA iP2770		2015					Pembelian	775.28	
339	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000003 s/d 000004	Canon / iP2770		2019					Pembelian	3,000.00	
340	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000004 s/d 000005	HP / Deskjet F2100		2008					Pembelian	2,200.00	DAU
341	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000005	Epson / i3110		2019					Pembelian	3,500.00	
342	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000006	Canon		2009					Pembelian	1,136.90	
343	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000007	HP		2009					Pembelian	1,000.00	

344	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000008 s/d 000009	HP / Deskjet D2666		2011					Pembelian	2,273.80	Sekretariat
345	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000011 s/d 000013	Canon		2012					Pembelian	6,986.25	
346	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000014 s/d 000015	Canon		2013					Pembelian	4,269.64	Pengadaan Tahun 2013
347	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000016	BROTHER / DPC-J140W		2014					Pembelian	1,680.70	
348	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000017	BROTHER / MFC-J5910DW	A3	2015					Pembelian	5,020.80	A3
349	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000018	-		2015					Pembelian	1,265.00	KECAMATAN ALAS
350	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000019	-		2015					Pembelian	1,265.00	KECAMATAN LENANGGUAR
351	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000020	-		2015					Pembelian	1,265.00	KECAMATAN LABUHAN BADAS
352	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000021	-		2015					Pembelian	1,265.00	KECAMATAN LAPE
353	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000022	-		2015					Pembelian	1,265.00	KECAMATAN LABANGKA
354	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000023	-		2015					Pembelian	1,265.00	KECAMATAN PLAMPANG
355	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000024 s/d 000029	Canon		2016					Pembelian	10,626.00	
356	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000030	Canon		2017					Pembelian	1,819.09	
357	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000031 s/d 000041	Canon		2017					Pembelian	22,000.00	
358	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000042	Canon		2017					Pembelian	2,000.00	
359	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000043	Canon		2017					Pembelian	1,819.09	
360	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000044	Epson		2017					Pembelian	3,250.00	
361	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000045 s/d 000046	Epson / L3110		2020					Pembelian	7,000.00	

362	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000047 s/d 000054	Epson			2020					Pembelian	39,160.00	
363	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000055 s/d 000058	Epson			2020					Pembelian	21,089.00	
364	02.10.02.03.009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	000001 s/d 000003	-			2013					Pembelian	195.00	Pengadaan Tahun 2013
365	02.19.01.02.018	Peralatan Permainan lainnya	000001 s/d 000050	-			2010					Pembelian	170,700.00	KIE Kit
366	02.19.01.02.018	Peralatan Permainan lainnya	000051 s/d 000083	-			2011					Pembelian	98,670.00	BKB Kit
367	02.19.01.02.018	Peralatan Permainan lainnya	000084 s/d 000148	-			2009					Pembelian	125,775.00	Alat Permainan Edukatif Kit
368	02.19.01.02.018	Peralatan Permainan lainnya	000149 s/d 000168	-			2013					Pembelian	52,426.00	BKB Kit (APE Kit) (Pengadaan Tahun 2013)
369	02.19.01.02.018	Peralatan Permainan lainnya	000169 s/d 000176	-			2014					Pembelian	22,830.00	
370	02.19.01.02.018	Peralatan Permainan lainnya	000197 s/d 000203	-			2016					Pembelian	25,602.50	BKB Kit
Jumlah Harga													8,839,894.35	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Kesehatan
Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
NO. KODE LOKASI : 12.15.06.07.03.01.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis- ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000001	Kurang Baik	Tidak		373	Jl. Durian No. 75	12/31/1983					Pembelian	278,065.00	Kantor Badan KBPP
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000002	Baik					12/31/2010					Pembelian	44,900.00	Rehab Gedung Sekretariat P2TP2A
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000003	Baik	Tidak			Kecamatan Moyo Utara	12/31/2011					Pembelian	221,342.30	Balai PKB
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000004	Baik	Tidak			Kecamatan Lopok	12/31/2011					Pembelian	193,992.05	Balai PKB + BIAYA PEMBANGUNAN KAMAR MANDI (KAPITALISASI)
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000005	Baik	Tidak			Kecamatan Rhee	12/31/2011					Pembelian	181,736.00	
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000006	Baik	Tidak			Kecamatan Maronge	12/31/2012					Pembelian	200,109.00	Balai PKB
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000007	Baik	Tidak			Kecamatan Labuhan Badas	12/31/2012					Pembelian	203,588.59	Balai PKB
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000008	Baik	Tidak			Kecamatan Moyo Hilir	12/31/2012					Pembelian	226,162.65	Balai PKB
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000009	Baik	Tidak			Kecamatan Labangka	12/31/2012					Pembelian	272,625.19	Balai PKB

10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000010	Baik	Tidak			Kecamatan Buer	12/31/2012			Pembelian	314,610.12	Balai PKB
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000011	Baik	Tidak			Kecamatan Alas	12/31/2012			Pembelian	240,644.65	Balai PKB
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000012	Baik								Pembelian	7,084.00	Biaya Distribusi Sarana Kerja PKB/PLKB
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000013	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Sumbawa				Pembelian	237,831.77	Pengadaan Tahun 2013
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000014	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Unter Iwes				Pembelian	233,607.07	Pengadaan Tahun 2013
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000015	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Lunyuk				Pembelian	245,920.72	Pengadaan Tahun 2013
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000016	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Tarano				Pembelian	291,968.91	Pengadaan Tahun 2013
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000017	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Moyo Hulu				Pembelian	192,808.24	Pengadaan Tahun 2013
18	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000019	Baik								Pembelian	208,811.00	BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA KECAMATAN UTAN
19	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000021	Baik								Pembelian	317,976.00	BANGUNAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA KECAMATAN PLAMPANG
20	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000022	Baik								Pembelian	262,005.00	BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA KECAMATAN LAPE
21	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000023	Baik	Tidak	Beton		KECAMATAN LANTUNG	11/9/2015		Tanah Milik Pemda	Pembelian	218,062.00	BALAI PENYULUH KB
22	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000024	Baik	Tidak	Beton		KECAMATAN LENANGGUAR	11/9/2015		Tanah Milik Pemda	Pembelian	207,080.00	BALAI PENYULUH KB
23	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000025	Baik	Tidak	Beton		KECAMATAN EMPANG	10/20/2015		Tanah Milik Pemda	Pembelian	362,006.56	BALAI PENYULUH KB + BIAYA PERENCANAAN & PENGAWASAN + HONORARIUM PPK, PEJABAT PENGADAAN PEMBANGUNAN 4 BALAI

24	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000026	Baik	Tidak	Beton		KECAMATAN ALAS BARAT	11/10/2015			Tanah Milik Pemda	Pembelian	257,755.68	BALAI PENYULUH KB
25	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000027	Baik	Tidak			Kecamatan Batu Lanteh	8/10/2016	029/PPK/BKBPP/III/2016		Tanah Milik Pemda	Pembelian	324,832.00	Balai Penyuluhan KB
26	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000028	Baik	Tidak			Kecamatan Orong Telu	7/22/2016	016/PPK/BKBPP/2016		Tanah Milik Pemda	Pembelian	303,254.58	Balai Penyuluhan KB
27	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000029	Baik	Tidak			Kecamatan Ropang				Tanah Milik Pemda	Pembelian	203,332.00	Balai Penyuluhan KB
28	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.010102.001	000001	Baik	Tidak			Jl. Durian No. 75	12/31/2011				Pembelian	99,036.00	Gudang Badan KBPP
29	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.010102.001	000002	Baik	Tidak			Kantor BKBPP Kabupaten Sumbawa Jalan Durian No. 75 Sumbawa Besar	6/8/2016	006/PPK/BKBPP/2016		Tanah Milik Pemda	Pembelian	53,476.00	Gudang Arsip
30	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	03.010106.019	000001	Baik	Tidak			Kecamatan Empang	12/31/2009				Pembelian	22,000.00	Rehab Gedung UPT KB Kec. Empang
31	Gedung Garasi/Pool Permanen	03.010114.001	000001	Baik	Tidak			Jl. Durian No. 75	12/31/2011				Pembelian	96,200.00	Rehabilitasi Bangunan Garasi
32	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	03.0102.02.004	000001	Baik	Tidak	Beton	453	Jalan Durian Kelurahan Uma Sima Kabupaten Sumbawa	6/9/2020	83 Tahun 2020		Tanah Milik Pemda	Hibah	0.00	UPTD Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa
33	Pagar Permanen	03.04.0104.001	000001	Baik			1	Jl. Durian No. 75	12/31/2008				Pembelian	30,000.00	Rehab Pagar Depan Kantor
34	Pagar Permanen	03.04.0104.001	000002	Baik			124	Jl. Durian No. 75	12/31/1999				Pembelian	1,727.00	
35	Pagar Permanen	03.04.0104.001	000003	Baik	Tidak			KECAMATAN UTAN					Pembelian	154,522.50	+ BIAYA PERENCANAAN & PENGAWASAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI PAGAR 2 KECAMATAN & KAMAR MANDI BALAI
36	Pagar Permanen	03.04.0104.001	000004	Baik	Tidak	Beton		KECAMATAN MOYO HULU	12/15/2015				Pembelian	89,328.00	
37	Pagar Permanen	03.04.0104.001	000005	Baik	Tidak			Kecamatan Lape					Pembelian	46,700.00	pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana

38	Pagar Permanen	03.04.0104.001	000006	Baik	Tidak		Kecamatan Plampang					Pembelian	35,300.00	pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
39	Pagar Permanen	03.04.0104.001	000007	Baik	Tidak		Kecamatan Lenangguar					Pembelian	79,150.00	pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana + Honorarium PPK, Pejabat Pengadaan, Tim PHO, dan Pemeriksa Barang
40	Pagar Permanen	03.04.0104.001	000008	Baik	Tidak	Beton	Kecamatan Sumbawa	9/20/2019	027.022/17/2019		Tanah Milik Pemda	Pembelian	125,303.02	+ Perencanaan + Pengawasan
41	Pagar Permanen	03.04.0104.001	000009	Baik	Tidak	Beton	Kecamatan Empang	11/18/2019	027.022/60/2019		Tanah Milik Pemda	Pembelian	146,173.30	Pagar Balai Penyuluhan KB Kecamatan + Perencanaan + Pengawasan + Honorarium Tim PTP, PPK, Pejabat Pengadaan + Pengurus Barang
Jumlah Harga													7,231,026.91	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Bidang : Bidang Kesehatan

Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.07.03.01.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	No m o r		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 13.	Regis-ter						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	04.02.0102.006	000001					Kecamatan Moyo Hulu	11/28/2016		Tanah Milik Pemda		Pembelian	4,099.98	Baik	di Balai Penyuluhan KB
2	Sumur Resapan	04.03.0105.005	000001					Jl. Durian No. 75	12/31/2010				Pembelian	2,200.00	Baik	Perbaikan Pipa PDAM
3	Sumur Resapan	04.03.0105.005	000002					Kecamatan Empang	12/6/2019	027.02286/2019	Tanah Milik Pemda		Pembelian	76,695.56	Baik	Instalasi Air Bersih Balai Penyuluhan KB Kecamatan Empang + Perencanaan + Pengawasan
4	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	04.03.06.03.004	000001					Kecamatan Utan	12/31/2012				Pembelian	3,082.50	Baik	Pemasangan Instalasi Listrik
5	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	04.03.06.03.004	000002					Kecamatan Lape	12/31/2012				Pembelian	3,082.50	Baik	Pemasangan Instalasi Listrik
Jumlah Harga														89,160.54		



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA**

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Kesehatan
Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
U P B : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
NO. KODE LOKASI : 12.15.06.07.03.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang 1.3.	Nomor Register	Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Asal usul	Tahun Cetak / Pem- belian	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
				Judul/ Pencipta	Spesifi- kasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Harian	05.01.01.01.010	000001	-	Buku Kerja	-	-	-	-		1	Pembelian	2011	132.00	Buku Kerja PKB
2	buku laporan lainnya (dst)	05.01.01.11.005	000002 s/d 000062	-	Buku Kerja	-	-	-	-		61	Pembelian	2011	8,052.00	Buku Kerja PKB
Jumlah Harga														8,184.00	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Kesehatan
Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
UPB : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
NQ. KODE LOKASI : 12.15.06.07.03.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Bangunan (P, SP, D)	Konstruksi Bangunan		Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl. Bln Thn Mulai	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)	Keterangan
			Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1				Jl. Duriat No. 75 Sumbawa Besar	01/01/1900		11/12/2017			Pembelian	49.500,00	Perencanaan/ DED Retali Berat Bangunan Gedung Kantor
Jumlah Harga													49.500,00	

2.3. Kinerja Pelayanan/Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa

Secara umum pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa berkaitan dengan dua urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. dua urusan tersebut dilaksanakan dengan program / kegiatan sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana
2. Program Pelayanan Kontrasepsi
3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB KR yang Mandiri
5. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
6. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
7. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak

Selain program diatas untuk mendukung pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan pelaporan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melaksanakan 5 program rutin yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa berdasarkan sasaran/target Renstra tahun 2016-2021 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak			V	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	100	100	100	100	100
	Persentase forum anak yang terbentuk			V	N/A	4.17	20.83	12.50	41.67	0	4.17	20.83	16.67	0.00	#VALUE!	99.9200639	100.02	133.333333	0
	Persentase pendampingan terhadap anak korban tindak kekerasan		V		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor politik dan ekonomi			V	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.3	2.2	4.7	5.7	0.0	98.15	40.00	83.93	100.00	0.00
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terselesaikan			V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai			V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase tingkat disiplin pegawai			V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti			V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah			V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat			V	B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	BB					
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu			V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase unmeet-need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)		V		13.00	12.00	11.00	10.50	10.00	13.80	11.52	11.00	10.34	10.40	99.20	100.48	100.00	100.16	99.60
	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)		V		100	100	100	100	100	77.1	79.80	79.1	80.3	80.2	77.07	79.8	79.07	80.28	80.19
	Persentase pelayanan KB/KR mandiri			V	16.26	21.83	22.00	22.50	23.00	16.3	21.83	14.00	12.6	42.03	100	100	63.64	55.91	182.74
	Persentase peserta KB aktif mandiri		V		16.26	21.83	22.00	22.50	23.00	16.3	21.83	14.00	12.6	42.03	100	100	63.64	55.91	182.74
	Persentase lembaga PIK KRR yang terbina			V	16.00	21.00	21.00	21.00	21.00	16.00	31.58	31.58	31.58	31.80	100	150.38	150.38	150.38	151.43

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa pada tahun-tahun tertentu terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai sehingga menimbulkan adanya kesenjangan/gap terhadap kinerja pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

- a. Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak

Pada indikator ini targetnya selalu tercapai setiap tahunnya hal itu dikarenakan setiap tahun Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa selalu melakukan sosialisasi terkait perlindungan dan pencegahan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak baik yang bersumber dari APBD kabupaten ataupun dari APBD Provinsi NTB

- b. Persentase forum anak yang terbentuk

Pada tahun ketiga untuk indikator ini dapat melampaui target yaitu sebesar 133% dari target yang ditetapkan, hal itu disebabkan adanya kebijakan dan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi untuk membentuk forum anak ditingkat kecamatan, namun pada tahun terakhir atau kelima target dari indikator ini tidak tercapai hal tersebut dikarenakan pembentukan forum anak kecamatan tidak dapat terlaksanak karena seluruh anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut terdampak refocusing untuk penanganan covid – 19

- c. Persentase pendampingan terhadap anak korban tindak kekerasan

Target dari indikator ini selalu tercapai karena setiap laporan kasus tindak kekerasan yang masuk secara langsung ataupun melalui unit PPA Polres Sumbawa selalu ditangani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

- d. Persentase perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor politik dan ekonomi

Capaian pada indikator ini cenderung rendah hal itu disebabkan karena anggaran pemberdayaan perempuan untuk peningkatan kapasitas perempuan sangat rendah, adapun pada tahun ke empat targetnya dapat tercapai hal itu dikarenakan adanya kolaborasi dengan instansi dan organisasi terkait untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Namun pada tahun kelima targetnya tidak dapat tercapai kembali karena tidak dapat terlaksanak karena seluruh anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut terdampak refocusing untuk penanganan covid – 19

- e. Persentase unmet-need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)

Untuk indikator ini pada tahun terakhir tidak dapat tercapai targetnya hal itu disebabkan karena pengaruh dari pandemic covid – 19 yang menyebabkan masyarakat enggan atau takut untuk mengunjungi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan dalam hal ini khusus pelayanan KB

- f. Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)

Pada indikator ini targetnya juga tercapai karena selama lima tahun karena adanya perilaku masyarakat yang tidak melakukan pelayanan KB tepat waktu dan juga ada masyarakat yang telah memakai alat kontrasepsi jenis MKJP namun belum waktu untuk mencabut alat tersebut masyarakat sudah melakukan pencabutan sendiri

- g. Persentase lembaga PIK KRR yang terbina

Target dari indikator ini setiap tahun targetnya tercapai bahkan cenderung melebihi target hal itu disebabkan karena adanya jumlah kelompok PIK R yang bertambah

- h. Persentase pelayanan KB/KR mandiri dan Persentase peserta KB aktif mandiri

Untuk indikator ini pada tahun ketiga dan keempat targetnya tidak tercapai hal itu disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pelayanan KB mandiri, karena masyarakat enggan melakukan pelayanan KB jika tidak ada pelayan serempak yang dilakukan oleh kabupaten dalam momentum-momentum tertentu

Selanjutnya berdasarkan capaian dari indikator yang telah disajikan diatas berikut akan diuraikan terkait realisasi anggaran yang teralokasikan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan, adapun Gambaran mengenai realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa berdasarkan Renstra tahun 2016-2021 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata-rata pertumbuhan	
	-1	-2	-3	-4	-5	-1	-2	-3	-4	-5	-1	-2	-3	-4	-5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Keluarga Berencana	471,759,050	562,748,825	1,154,199,975	920,406,625	1,719,079,900	468,199,050	543,828,325	1,139,379,600	900,289,770	1,700,692,900	99.25	96.64	98.72	97.81	98.93	965,638,875	950,477,929
Program Pelayanan Kontrasepsi	55,816,375	374,997,375	780,783,000	554,834,325	897,631,100	55,816,375	374,919,375	642,031,450	446,637,325	732,936,080	100.00	99.98	82.23	80.50	81.65	532,812,435	450,468,121
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	366,998,820	823,268,070	4,906,801,670	4,976,640,725	3,821,902,250	364,406,009	813,139,496	4,810,511,381	4,602,966,331	3,747,881,950	99.29	98.77	98.04	92.49	98.06	2,979,122,307	2,867,781,033
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	103,940,775	294,661,025	294,447,475	161,613,025	198,771,500	95,470,775	285,427,687	291,875,475	158,600,225	197,321,500	91.85	96.87	99.13	98.14	99.27	210,686,760	205,739,132
Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	34,584,450	37,609,250	26,079,300	41,944,400	15,441,250	33,350,950	36,849,240	22,716,531	39,464,400	15,361,250	96.43	97.98	87.11	94.09	99.48	31,131,730	29,548,474
Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	194,108,450	367,224,300	428,453,325	385,090,600	302,462,695	177,921,950	356,255,682	388,477,429	370,926,058	266,108,695	91.66	97.01	90.67	96.32	87.98	335,467,874	311,937,963
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	24,742,050	36,222,450	33,272,750	19,763,400	11,078,100	24,262,050	35,422,450	31,892,750	19,543,400	2,346,200	98.06	97.79	95.85	98.89	21.18	25,015,750	22,693,370
Program Pelayanan administrasi perkantoran	276,798,000	352,040,575	279,260,660	301,773,970	252,236,100	260,935,180	327,288,208	272,395,250	-	223,548,578	94.27	92.97	97.54	-	88.63	292,421,861	216,833,443
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3,014,900,330	2,598,797,710	2,011,731,840	3,405,489,540	1,524,800,289	2,103,848,483	2,515,005,432	1,905,800,378	2,843,713,626	1,455,814,010	69.78	96.78	94.73	83.50	95.48	2,511,143,942	2,164,836,386
Program Peningkatan disiplin aparatur	20,490,275	21,515,500	9,291,800	-	-	12,564,177	21,515,500	9,201,800	-	-	61.32	100.00	99.03	#DIV/0!	#DIV/0!	10,259,515	8,656,295
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	28,675,600	27,902,400	22,196,520	6,853,650	5,611,300	28,655,000	27,175,324	22,076,120	6,733,650	5,610,350	99.93	97.39	99.46	98.25	99.98	18,247,894	18,050,089
Program penyusunan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah	36,994,000	35,644,000	32,763,850	34,921,750	116,064,000	32,520,480	34,795,600	31,444,600	34,658,210	34,703,800	87.91	97.62	95.97	99.25	29.90	51,277,520	33,624,538
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	266,933,875	-	-	-	-	254,816,923	-	-	-	-	95.46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	53,386,775	50,963,385
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	167,289,050	-	-	-	-	163,224,050	-	-	-	-	97.57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	33,457,810	32,644,810
	5,064,031,100	5,532,631,480	9,979,282,165	10,809,332,010	8,865,078,484	4,075,991,452	5,371,622,319	9,567,802,764	9,423,532,995	8,382,325,313	80.49	97.09	95.88	87.18	94.55	8,050,071,048	7,364,254,969

Berdasarkan Tabel diatas diketahui terdapat tahun-tahun tertentu dalam periode Renstra 2016-2020 jumlah anggaran suatu program tidak terealisasi sesuai rencana yang merupakan kesenjangan/gap terhadap alokasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa. selanjutnya dengan melakukan perbandingan antara jumlah alokasi dengan jumlah realisasi, rata-rata pertumbuhan antara realisasi dan anggaran berada pada angka 91,48%. Berdasarkan hal tersebut dapat disajikan analisis terhadap rasio yaitu:

- a. Pada tahun pertama dan ketiga rasio antara realisasi dan anggaran kurang baik karena realisasi pada tahun tersebut berada dibawah 90% atau 80,49% untuk tahun pertama dan 87,18% pada tahun ketiga, angka tersebut berada dibawah rata- rata pertumbuhan antara realisasi dan anggaran. Factor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran pada tahun pertama dan ketiga adalah progres dari pelaksanaan kegiatan yang lambat dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan sehingga banyak kegiatan yang menumpuk pada akhir tahun.
- b. Rasio antara realisasi dan anggaran yang paling baik adalah pada tahun kedua yaitu berada pada angka 97,09%, angka tersebut berada diatas angka rata- rata pertumbuhan antara realisasi dan anggaran. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa pada tahun kedua adalah progres dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dari apa yang diuraikan diatas gambaran rasio antara realisasi dan anggaran belum dapat mencapai 100%, hal tersebut dikarenakan masih ada pelaksanaan kegiatan yang tidak dikerjakan sesuai dengan jadwal bahkan ada kegiatan yang urung dilaksanakan karena sudah tidak memiliki cukup waktu untuk dilaksanakan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa

Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa memiliki sejumlah tantangan dan peluang untuk mengembangkan kualitas atau kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi

yang melekat. Maka berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi NTB, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS dalam periode Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa sebelumnya (Tahun 2016-2021) teridentifikasi beberapa hal yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa untuk periode Renstra selanjutnya yaitu periode Tahun 2021-2026.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian terhadap jumlah jenis pelayanan/penyelenggaraan tugas dan fungsi, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Hal itu sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa; dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dapat disebutkan bahwa yang disebut sebagai permasalahan perangkat daerah adalah kesenjangan antara kinerja perangkat daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai perangkat daerah di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan perangkat daerah tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar penentuan isu strategis bagi perangkat daerah. Isu strategis itu sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah karena akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di masa yang akan datang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa serta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

TABEL 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengendalian penduduk	1. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tergantung dari pemerintah pusat	1. Kepadatan penduduk antar kecamatan belum proposional

2.	Keluarga Berencana	2. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	2. Masih kurangnya pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dalam penyadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga melalui program KB
3.	Keluarga Sejahtera	3. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	3. Belum semua peserta KB dari kelompok masyarakat miskin mendapat penguatan untuk peningkatan kesejahteraan
4.	Perlindungan perempuan dan anak	4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
5.	Kualitas keluarga,	5. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	5. Masih rendahnya kualitas kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender
6.	Perlindungan khusus anak	6. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	6. Pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak masih rendah

Uraian masalah pokok pada Tabel T-B.35 dalam RPJMD di atas merupakan Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum. Memperhatikan isi Tabel T-B.35 dalam rancangan awal RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa klasifikasi permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa beserta factor-faktor yang mempengaruhinya yang disusun berdasarkan pendekatan bagian-bagian, yaitu:

TABEL 3.2.
Pemetaan Permasalahan terkait Pelayanan/Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengendalian Penduduk	1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk 2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	1. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tergantung dari pemerintah pusat

2.	Keluarga Berencana	3. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local 4. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) 5. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB 6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	2. Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan 3. Kesertaan pria dalam ber-KB masih rendah 4. Kualitas dan kuantitas petugas lapangan Keluarga Berencana belum optimal 5. Pelayanan kontrasepsi secara gratis pada masyarakat miskin belum optimal 6. Persentase Unmeet Need masih tinggi 7. Belum semua klinik KB tersedia Tenaga medis yang berkualitas 8. Tenaga medis yang dilatih CTU (Contraception Technology Update) masih kurang
3.	Keluarga Sejahtera	7. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 8. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	9. Kualitas kader/ tenaga pendamping belum optimal 10. Kualitas kelompok Bina keluarga belum optimal 11. Pembinaan terhadap kader belum optimal Akses permodalan untuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera kurang (UPPKS)
4.	Kualitas Hidup Perempuan	9. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah 10. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan 11. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	12. Belum maksimalnya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan 13. Anggaran yang mendukung program Pemberdayaan Perempuan kurang optimal 14. Bahan informasi dan sosialisasi program Pemberdayaan Perempuan terbatas
5.	Perlindungan perempuan	12. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan 13. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan 14. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	15. Sarana dan prasarana penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan belum optimal
6.	Kualitas Keluarga	15. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak 16. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak 17. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	16. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurang

7.	Sistem Data Gender dan Anak	18. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak	17. Sumberdaya pengolah data yang kurang baik dari sisi anggaran maupun SDMnya
8.	Pemenuhan Hak Anak	19. Pelembagaan PHA ada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha 20. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	18. Belum terpenuhinya hak-hak anak sesuai standar
9.	Perlindungan Khusus Anak	21. Pencegahan kekerasan terhadap anak 22. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 23. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	19. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak kurang optimal 20. Lembaga penanganan kasus anak di tingkat kecamatan dan desa kurang

Secara umum, akar masalah pada Tabel 3.2. pada seluruh bidang di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa memiliki kesamaan. Persamaan tersebut mencakup adanya persoalan yang terkait dengan pengendalian penduduk, kualitas dan kuantitas pelayanan KB, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak. Masalah dan akar masalah pada tabel di atas akan berkaitan dengan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang akan disajikan pada bagian berikutnya dalam dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ini.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah (kabupaten/kota) diberikan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib selanjutnya terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa

selanjutnya diberikan kewenangan oleh regulasi untuk menyelenggarakan sub urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan salah satu sub urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026, mengusung Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa “Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”. “Sumbawa gemilang” bermakna bahwa Kabupaten Sumbawa harus menjadi daerah yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional; dan “berkeadaban” yang mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa harus mampu memegang teguh agama dan nilai-nilai positif dari budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual; penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara; kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup.

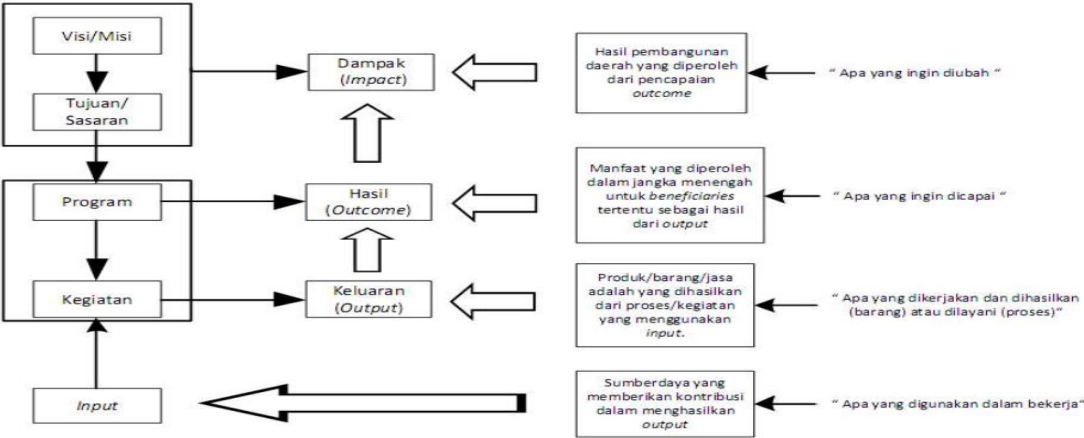
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dipenuhi atau dicapai melalui pelaksanaan lima misi. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan terhadap penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026, maka telah ditetapkan nomenklatur tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran RPJMD 2021-2026. Setiap indikator sasaran tersebut menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menentukan nomenklatur tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dituangkan atau dinyatakan dalam ranwal Restra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa, seperti pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	Misi	Penjelasan Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Sumbawa Gemilang dan Berkeadaban	Sumbawa Sehat dan Cerdas	Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat	Pertumbuhan Indeks Komposit IPM Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya kualitas kesehatan dan Akses Pendidikan	Peningkatan Indeks Kesehatan
	Sumbawa Sejahtera dan Mandiri	Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Yang Berkualitas	Penurunan Indeks Gini	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai komponen IPM: pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Peningkatan Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)
	Sumbawa Bersih dan melayani	Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yg cepat dan efisien.	Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan pelayanan publik	Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi
	Sumbawa Aman dan Berbudaya	Mewujudkan masyarakat yang beriman, berakarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.	Meningkatkan keamanan dan masyarakat yang berbudaya	Persentase peningkatan kualitas perempuan dan anak	Meningkat nya kualitas perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender Hasil Pengukuran Kabupaten Layak Anak

Hubungan antara program, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih sebagaimana termaktub dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1. Alur Keterkaitan Program / Kegiatan Dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati



Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa, berikut ini disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor yang disebutkan dibawah ini nantinya kemudian menjadi bahan perumusan isu strategis pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTB

3.3.1. Telaahan Renstra Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

Berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.

- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Memperhatikan sasaran dari renstra BKKBN diatas secara umum memiliki korelasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (sasaran)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu: “Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi,

Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Berdasarkan dokumen rencana strategis kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020-2024, diketahui bahwa sasaran-sasaran ditentukan sesuai dengan enam tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4 Tujuan, sasaran strategis Kementerian PPPA Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
2	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak
3	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak
4	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO
5	Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus
6	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian PPPA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA

Dari sasaran yang terdapat dalam renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ada lima sasaran yang secara langsung memiliki korelasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan kualitas perempuan dan anak.

3.3.3. Telaahan Renstra DP3AP2KB Provinsi

Berdasarkan dokumen renstra Dinas P3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2019-2023, diketahui bahwa sasaran-sasaran ditentukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5. Tujuan Dan Sasaran Pelayanan DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran
----	--------	---------

1	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
		2. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
2	Pendewasaan usia perkawinan pertama	Meningkatnya usia perkawinan pertama (Perempuan)

Sasaran dari Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi NTB secara umum memiliki korelasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa, ada dua sasaran yang terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan satu sasaran yang terkait dengan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Sumbawa

Penelahaan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sumbawa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa dilaksanakan dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa.

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa merupakan hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa. dokumen tersebut menjadi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan pada setiap sektor.

Memperhatikan tujuan dari adanya kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Sumbawa, maka kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa tidaklah signifikan hal itu disebabkan karena dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan dokumen KLHS ada 220 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan Kabupaten, dari tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa bertanggungjawab pada pilar sosial dan Pilar Hukum dan tata kelola. Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan dan indikator dari dua pilar tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Menjadi Tanggungjawab DP3AP2KB Berdasarkan Dokumen KLHS

NO.	TUJUAN TPB	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)
1.	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.
2.	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Total Fertility Rate (TFR).	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).
		Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).
		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.
		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).
3.	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).
		Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).
		Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).

NO.	TUJUAN TPB	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).
		Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
		Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).
		Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).
		Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).
		Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
4.	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).
		Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
		Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan

NO.	TUJUAN TPB	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)
		Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)

Dari tabel diatas Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa sudah sesuai dan memiliki implikasi terhadap pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap sasaran jangka menengah pada Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2020-2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 2020-2024, Dinas P3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang disajikan pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi acuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk
2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Terjadinya praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti perkawinan dibawah umur, anak yang berhadapan dengan hukum dan pekerja anak, serta munculnya kekerasan di media online
4. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN SUMBAWA

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan tujuan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesuaian dengan kewenangan. Pada tabel berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa Perangkat Daerah memastikan kontribusinya terhadap target indikator sasaran daerah, yaitu:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Kesehatan	0,737	0,742	0,747	0,751	0,756
		Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	1,99	1,17	2,39	2,77	2,76
			Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)	9.235	9.324	9.413	9.502	9.591
		Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
			Nilai Reformasi Birokrasi	51,32	51,91	52,5	55	57,5
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	BB	BB	BB	A
			IPG	93,788	93,957	94,188	94,481	94,836
		Miningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	8,19	11,00	12,00	13,00	14,00
			Status KLA	-	Pratama	Pratama	Pratama	Madya
		Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	568,00	615,00	661,00	707,00	754,00

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa di atas dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada sasaran pemerintah daerah. Khususnya sasaran yang mendukung pelaksanaan misi pertama, kedua, ketiga dan keempat dari Bupati/Wakil Bupati Sumbawa periode 2021-2026.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN SUMBAWA

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan sebelumnya yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tabel 5.1.			
Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa			
Visi : Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas kesehatan serta kualitas perempuan dan anak dengan peningkatan layanan pengendalian penduduk dan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan	Misi 1 : SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan		
	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP)	Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Misi 2 : SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata		
	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Penguatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
	Misi 3 : SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien		
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program
	Misi 4 : SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA Mewujudkan masyarakat yang beriman, berakarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan		
	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Penguatan kebijakan dan regulasi	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan
	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Penguatan kebijakan dan regulasi	Meningkatkan pemenuhan Hak anak melalui 5 Klaster KLA

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka berbagai strategi yang di tentukan untuk dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa selanjutnya dioperasionalisasikan dalam program-program yang telah disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- d. Program Perlindungan Perempuan;
- e. Program Perlindungan Khusus Anak;
- f. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- g. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
- h. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- i. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan
- j. Program Pengendalian Penduduk

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa selanjutnya akan diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan

program-program sebagaimana tersebut di atas yang akan di uraikan pada bagian berikutnya dalam dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ini.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umunya dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Adapun rencana program, kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2021-2026 disajikan pada table berikut ini :

TC-27 PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026 DINAS P2KBP3A (BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)																		
Norek	Tujuan / Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kepmendagri 050.5889 Tahun 2021			PPTK	Formulasi Target Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2021)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir (2026)	
		Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan			Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Target	Alokasi Anggaran (Rp)		
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Nilai Reformasi Birokrasi				51,32	7.601.457.366	51,91	6.552.312.914	52,5	7.843.419.114	55	8.586.004.397	57,5	8.628.934.419	57,5	8.628.934.419
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A				BB	7.601.457.366	A	6.552.312.914	BB	7.843.419.114	BB	8.586.004.397	A	8.628.934.419	A	8.628.934.419
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	MENINGKATNYA HASIL PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS P2KBP3A	Peningkatan Nilai Akip Dinas P2KBP3A	NILAI	Sekretaris	Jumlah Nilai Variabel Evaluasi AKIP	78,49	7.601.457.366	81,79	6.552.312.914	72,83	7.843.419.114	75,49	8.586.004.397	81,79	8.628.934.419	81,79	8.628.934.419
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Tersusunnya Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Dok		Jumlah dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun tahun N	7	79.675.998	7	78.773.400	7	45.585.720	7	367.878.599	7	369.717.992	7	369.717.992
	Penyusunan Dok Perencanaan PD	Tersusunnya Dok Perencanaan PD	Jumlah Dok Perencanaan PD	Dok		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tahun N	2	4.147.160	1	10.747.300	1	29.092.140	1	27.375.200	1	27.512.076	1	27.512.076
	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Tersedianya Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	Dok		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tahun N	1	2.049.816	1	1.752.300	1	1.855.000	1	3.136.280	1	3.151.961	1	3.151.961
	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Dok		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun tahun N	1	1.916.760	1	877.000	1	1.321.600	1	1.641.280	1	1.649.486	1	1.649.486
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA- SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	Dok		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tahun N	1	1.984.816	1	1.768.000	1	1.640.000	1	1.881.280	1	1.890.686	1	1.890.686
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	Dok		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tahun N	1	1.899.816	1	852.800	1	1.257.600	1	1.641.280	1	1.649.486	1	1.649.486
	Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun tahun N	2	1.655.880	2	1.910.000	2	4.221.900	2	4.304.280	2	4.325.801	2	4.325.801
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja PD	Lap		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tahun N	4	66.021.750	4	60.866.000	4	6.197.480	4	327.898.999	4	329.538.494	4	329.538.494

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok		Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang disusun tahun N	7	6.096.447.444	7	6.263.427.355	7	7.336.484.951	7	7.612.212.398	7	7.650.273.460	7	7.650.273.460
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB		Jumlah orang yang menerima gaji tahun N	54	6.076.329.305	59	6.162.950.925	69	7.241.531.551	69	7.516.385.598	69	7.553.967.526	69	7.553.967.526
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disusun tahun N	3	580.000	3	90.000.000	3	80.520.000	3	79.840.000	3	80.239.200	3	80.239.200
	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dok		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun tahun N	365	16.434.599	538	1.855.000	586	3.790.000	538	4.740.000	538	4.763.700	538	4.763.700
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun tahun N	1	473.000	1	2.735.548	1	2.891.600	1	2.540.000	1	2.552.700	1	2.552.700
	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun tahun N	1	694.100	1	1.261.000	1	2.141.200	1	2.256.200	1	2.267.481	1	2.267.481
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dok		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang disusun	1	638.000	1	1.292.000	1	2.190.000	1	2.730.000	1	2.743.650	1	2.743.650
	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Lap		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang disusun tahun N	4	525.800	4	1.582.882	4	1.725.600	4	1.940.600	4	1.950.303	4	1.950.303
	Penyusunan PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun tahun N	1	772.640	1	1.750.000	1	1.695.000	1	1.780.000	1	1.788.900	1	1.788.900
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok		Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi umum PD yang disusun tahun N	4	27.728.318	4	19.878.155	4	122.056.527	4	137.182.250	4	137.868.161	4	137.868.161
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang tersedia tahun N	8	1.383.318	8	1.419.255	5	2.460.548	5	24.856.250	5	24.980.531	5	24.980.531

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia tahun N	48	2.460.000	12	810.000	12	1.170.000	12	2.400.000	12	2.412.000	12	2.412.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disusun tahun N	12	1.897.000	12	1.900.000	12	3.735.000	12	7.208.000	12	7.244.040	12	7.244.040
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun tahun N	5	21.988.000	5	15.748.900	21	114.690.979	21	102.718.000	21	103.231.590	21	103.231.590
	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun tahun N	1	1.082.124.000	1	15.753.100	1	48.728.000	1	72.240.000	1	72.601.200	1	72.601.200
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia tahun N	1	1.082.124.000	1	15.753.100	12	48.728.000	6	72.240.000	12	72.601.200	12	72.601.200
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang disusun tahun N	3	123.411.774	3	87.141.813	3	110.682.720	3	131.916.000	3	132.575.580	3	132.575.580
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	14.008.153	2	14.835.000	2	26.346.800	2	23.215.500	2	23.331.578	2	23.331.578
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia tahun N	3	90.777.401	3	53.157.288	3	65.694.920	3	91.995.000	3	92.454.975	3	92.454.975
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disusun tahun N	1	18.626.220	1	19.149.525	1	18.641.000	1	16.705.500	1	16.789.028	1	16.789.028
	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun tahun N	3	192.069.832	3	87.339.091	3	179.881.196	3	264.575.150	3	265.898.026	3	265.898.026
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1	2.723.700	1	12.839.000	1	38.634.380	1	39.820.450	1	40.019.552	1	40.019.552

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun N	6	80.514.337	5	74.500.091	5	131.136.816	5	180.254.700	5	181.155.974	5	181.155.974
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara tahun N					15	10.110.000	15	9.500.000	15	9.547.500	15	9.547.500
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun N	1	108.831.795					1	35.000.000	1	35.175.000		35.175.000
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		IPG				93,79	34.468.396	93,96	50.327.550	94,19	74.485.000	94,48	78.515.000	94,84	78.907.575	94,84	78.907.575
		Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD				8,19	34.468.396	11,00	50.327.550	12,00	74.485.000	13,00	78.515.000	14,00	78.907.575	14,00	78.907.575
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya perangkat daerah yang menerapkan analisis gender dalam proses penganggaran	Cakupan PD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender melalui APBD	%	Kabid Kesetaraan Gender & Peningkatan Kualitas Keluarga DP2KBP2A	Jumlah PD yang menerapkan anggaran Responsif Gender Melalui APBD / Jumlah PD x 100	52,73	6.697.572	52,73	39.781.400	53,57	43.495.000	54,57	45.600.000	55,57	45.828.000	55,57	45.828.000
		Meningkatnya jumlah perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik,ekonomi sosial dan budaya	Cakupan perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik,ekonomi sosial dan budaya	%	Kabid Kesetaraan Gender & Peningkatan Kualitas Keluarga DP2KBP2A	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik,ekonomi sosial dan budaya / Jumlah perempuan usia produktif x 100	0,036	27.770.824	0,01	10.546.150	0,062	30.990.000	0,062	32.915.000	0,072	33.079.575	0,072	33.079.575
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Meningkatnya program/kegiatan pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	Jumlah program / kegiatan pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	Buah		Jumlah program / kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	38	6.697.572	30	39.781.400	39	43.495.000	45	45.600.000	50	45.828.000	50	45.828.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PUG Kewenangan Kab/Kota	Dok		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota tahun N	1	949.488	1	7.025.000,00	1	15.460.000,00	1	11.320.000	1	11.376.600	1	11.376.600

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Dok		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota tahun N	1	711.180	1	2.631.400,00	1	10.050.000,00	1	11.320.000	1	11.376.600	1	11.376.600
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	Perangkat Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota tahun N	40	483.927	20	29.775.000	40	7.465.000	40	11.380.000	40	11.436.900	40	11.436.900
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	Perangkat Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota tahun N	40	4.552.977	40	350.000	40	10.520.000	40	11.580.000	40	11.637.900	40	11.637.900
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya kegiatan pendampingan pemberdayaan perempuan pada sektor politik,ekonomi sosial dan budaya	Jumlah perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik,ekonomi sosial dan budaya	Orang		Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum,sosial dan ekonomi tahun N	90	24.222.312	60	7.356.150	90	22.165.000	90	24.115.000	90	24.235.575	90	24.235.575
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Dok		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun tahun N	3	24.222.312	2	7.356.150	3	22.165.000	3	24.115.000,00	3	24.235.575	3	24.235.575

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan			Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan tahun N	1	3.548.512	1	3.190.000	1	8.825.000	1	8.800.000	1	8.844.000	1	8.844.000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia	Dok		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia tahun N	2	3.548.512	3	3.190.000	4	8.825.000	4	8.800.000	4	8.844.000	4	8.844.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani		Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP2KBP3A	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / Jumlah penduduk perempuan x 100.000	9,18	159.280.197	6,55	110.930.258	5,28	156.357.615	5,2	225.040.000	4,69	226.165.200	4,69	279.044.985
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Terlaksananya KIE melalui media massa (cetak, elektronik)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan			Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan tahun N	1	54.502.507	2	56.191.000	1	55.989.800	1	50.945.000	1	51.199.725	1	51.199.725
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Dok		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun tahun N	2	54.502.507	2	56.191.000,00	2	55.989.800,00	2	50.945.000,00	2	51.199.725	2	51.199.725

	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Cakupan korban kekerasan perempuan yang terlayani			Jumlah Korban Kekerasan Perempuan yang mendapatkan layanan / Jumlah Korban kekerasan Terhadap Perempuan x 100	100	80.403.029	100	54.739.258	100	60.537.815	100	129.585.000	100	130.232.925	100	181.420.825
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan tahun N	12	51.187.900						-		-	12	51.187.900
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Layanan		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota tahun N	6	29.215.129	6	54.739.258	6	60.537.815	6	129.585.000	6	130.232.925	6	130.232.925
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan			Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1	24.374.661	12	-	12	39.830.000	12	44.510.000	12	44.732.550	12	46.424.435
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat	24	22.682.776			65	39.830.000	65	44.510.000	65	44.732.550	65	44.732.550
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Dok		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1.691.885						-		-	1	1.691.885

	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)				9.235	1.435.054.212	9.324	1.601.618.624	9.413	2.520.342.500	9.502	3.058.218.000	9.591	522.449.250	9.591	524.169.250
		Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera				92,15	1.435.054.212	82,84	1.601.618.624	85,01	2.520.342.500	88	3.058.218.000	89	522.449.250	89	524.169.250
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Menurunnya Angka Keluarga Pra Sejahtera	Angka Keluarga Pra Sejahtera		Kabid KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP2KBP3A	Angka Keluarga Pra Sejahtera	23.329	1.399.087.847	27.915	1.505.842.000	22.983	2.357.005.000	19.179	2.999.468.000	19.083	463.405.500	16	465.125.500
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Menurunnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun			UKP = umur minimal + 1/(proporsi penduduk belum kawin kelompok umum 15 - 19 - proporsi penduduk belum kawin kelompok umum terbesar 45 - 49) x 5 total proporsi dari umur terkecil ke terbesar - (umur maksimal - umur minimal) x proporsi penduduk belum kawin kelompok umum terbesar	39,08	1.399.087.847	29,13	1.505.842.000	26,11	2.357.005.000	26	529.868.000	25	463.405.500	25	465.125.500
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21	341.649.000	27	448.380.000	20	359.430.000	21	252.000.000	20	253.260.000	20	253.260.000
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang		Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	20.899.651	2	19.222.000	20	11.180.000	20	78.755.000	20	79.148.775	20	79.148.775

	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	11.800.000	392	1.023.830.000	1176	1.962.975.000	20	60.470.000	20	60.772.350	20	60.772.350
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Lap Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Lap		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	24	457.012.196	8	1.720.000						-	8	1.720.000
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Lap Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Lap		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	24	567.727.000	19	12.690.000	1	17.800.000	1	69.875.000	1	70.224.375	1	70.224.375
	Advokasi dan Promosi IPK	Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangsa (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Lap		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)					60	5.620.000				-	60	5.620.000
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)									8	68.768.000	8	69.111.840	8	69.111.840	

	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga										392	2.469.600.000	392	2.481.948.000	392	2.481.948.000
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)										100	1.176.000.000	100	1.181.880.000	100	1.181.880.000
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan										3825	1.293.600.000	3825	1.300.068.000	3825	1.300.068.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya pemenuhan indikator kulitas keluarga	Tingkat Pemenuhan Indikator kualitas keluarga		Kabid Kesetaraan Gender & Peningkatan Kualitas Keluarga DP2KBP2A	Jumlah indkator kualitas keluarga yang tercapai tahun N / Jumlah indkator kualitas keluarga x 100	20	35.966.365	40	95.776.624	68,97	163.337.500	80	58.750.000	100	59.043.750	80	59.043.750
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Jumlah Indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi			Jumlah Indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi tahun N	1	35.264.240	2	91.406.624	3	104.657.500	4	50.460.000	5	50.712.300	5	50.712.300
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Perangkat Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30	31.425.526	1	4.317.000	25	78.677.500	25	14.330.000	25	14.401.650	25	14.401.650
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia	Dok		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	3.838.714	1	2.692.499	4	16.225.000	4	23.350.000	4	23.466.750	4	23.466.750
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lap Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Lap		Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3	84.397.125	1	9.755.000	1	12.780.000	1	12.843.900	1	12.843.900	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak			Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dilatih tahun N	1	702.125	1	4.370.000	1	58.680.000	1	8.290.000	1	8.331.450	1	8.331.450
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Dok		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	702.125	1	4.370.000	1	58.680.000	1	8.290.000	1	8.331.450	1	8.331.450
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kulitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Status KLA					127.529.645	Pratama	316.636.601	Pratama	470.410.115	Pratama	391.453.000	Madya	274.217.265	Madya	562.375.008
		Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak				568	127.529.645	615	316.636.601	661	470.410.115	707	391.453.000	754	274.217.265	754	562.375.008
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terlaksananya pengelolaan sistem data gender dan anak	Capaian Kinerja Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Kabid Kesetaraan Gender & Peningkatan Kualitas Keluarga DP2KBP2A	Jumlah sistem pelaporan dari kemenPPA / Jumlah sistem pelaporan yang dikelola OPD x 100	100	21.622.599	100	14.675.000	100	20.095.000	100	17.160.000	100	17.245.800	100	17.245.800
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Tingkat Penginputan data sistem SIGA dan SIMPONI			Jumlah Data pengaduan TKA dan TKP / Jumlah Data TKA dan TKP yang terinput dalam sistem x 100	100	21.622.599	100	14.675.000	100	20.095.000	100	17.160.000	100	17.245.800	100	17.245.800
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kab/Kota	Jumlah Dok Data Gender dan Anak Kab/Kota yang Tersedia	Dok		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia tahun N	12	20.283.191	12	13.230.000	12	8.755.000	12	8.140.000	12	8.180.700	12	8.180.700
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	Dok		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota tahun N	2	1.339.408	2	1.445.000	2	11.340.000	2	9.020.000	2	9.065.100	2	9.065.100

	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya persentase Pemenuhan Indikator KLA	Tingkat Pemenuhan Indikator KLA		Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP2KBPA	Publikasi Kementerian PPA	43,00	45.449.147	50,59	68.740.000	50,30	146.617.372	70,07	153.918.000	75,40	154.687.590	75,40	154.687.590
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk			Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk tahun N	10	35.483.098	17	20.592.000	10	45.311.180	10	39.098.000	10	39.293.490	10	39.293.490
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10	31.618.032	17	18.472.000	20	27.256.300	20	28.748.000	20	28.891.740	20	28.891.740
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Dok		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota tahun N	1	3.865.066	1	2.120.000	1	18.054.880	1	10.350.000	1	10.401.750	1	10.401.750
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi			Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi tahun N	3	9.966.049	3	48.148.000	3	101.306.192	3	114.820.000	3	115.394.100	3	115.394.100
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Orang		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota tahun N	60	6.025.000	60	2.350.000	100	16.100.000	100	17.255.000	100	17.341.275	100	17.341.275
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Dok		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang disusun tahun N			3	27.090.000	1	28.593.192	1	33.325.000	1	33.491.625	1	33.491.625

	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Dok		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang diurus pada	2	3.183.312	1	5.483.000	2	7.035.000	2	4.775.000	2	4.798.875	2	4.798.875
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Dok		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang diurus pada	1	757.737	3	13.225.000	3	49.578.000	3	59.465.000	3	59.762.325	3	59.762.325
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap anak	Cakupan Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan		Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP2KBP3A	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi / Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) X 100%	0,025	60.457.899	0,035	233.221.601	0,030	303.697.743	0,028	220.375.000	0,025	102.283.875	0,025	390.441.618
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Terlaksananya KIE melalui media media massa (cetak, elektronik)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1	3.260.150	2	71.410.000	1	87.930.000	1	51.545.000	1	51.802.725	1	139.732.725
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah PD yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Perangkat Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	1	3.260.150	2	14.670.000	6	34.090.000				-	6	34.090.000

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Dok		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang disusun tahun N			5	56.740.000	2	53.840.000			-	2	53.840.000	
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Terlaksananya advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang								120	51.545.000	120	51.802.725	120	51.802.725	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Cakupan korban kekerasan anak yang terlayani			Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) Jumlah Korban Kekerasan anak yang dilayani / Jumlah korban kekerasan anak ditingkat Kabupaten x 100	100	35.609.749	100	99.524.428	100	141.578.579	100	134.320.000	100	15.798.600	100	141.837.179
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kab/Kota	Orang		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan pada tahun N	12	130.000	52	1.090.000	45	15.540.000	45	15.720.000	45	15.798.600	45	15.798.600
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Layanan		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus pada tahun N	6	35.479.749	6	98.434.428	6	126.038.579	-	-	-	6	126.038.579	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan layanan AMK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan								25	118.600.000	25	119.193.000	25	119.193.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal			Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	21.588.000	2	62.287.173	2	74.189.164	2	34.510.000	2	34.682.550	2	108.871.714
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Dok		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang disusun tahun N	2	21.588.000	2	62.287.173	2	74.189.164	-	-	-	2	74.189.164	
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK									100	34.510.000	100	34.682.550	100	34.682.550	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB																		
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kulitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Kesehatan				0,737	5.648.520.256	0,742	7.701.029.100	0,747	13.252.766.025	0,751	9.722.464.000	0,756	9.771.076.320	0,756	9.771.076.320
		Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)				1,99	4.191.385.056	1,17	4.501.927.500	2,39	9.204.804.175	2,77	6.638.248.000	2,76	6.671.439.240	2,76	7.655.108.740
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk		Kabid Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan	Jumlah penduduk tahun N - Jumlah penduduk tahun N-1) / Jumlah penduduk tahun N x 100	1,12	887.933.374	1,9	171.715.780	1,36	1.213.507.750	1,84	1.549.468.000	1,8	1.557.215.340	1,8	1.568.365.340
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan Pemda Kabu/Kota dalam rangkaPengendalian Kuantitas Penduduk	Tersusunnya dokumen pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk	Jumlah kebijakan pengendalian kualitas penduduk			Jumlah dokumen pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk yang disusun tahun N	2	2.977.045	2	17.905.000	2	46.950.000	2	58.985.000	2	59.279.925	2	59.279.925
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dok Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK Tingkat Kab/Kota	Dok		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota tahun N	1	1.517.045	1	16.270.000	1	35.550.000	1	45.955.000	1	46.184.775	1	46.184.775
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Terlaksananya Sarasehan Hasil PemutakhiranData Keluarga	Jumlah Lap Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Lap		Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang disusun tahun N	1	1.460.000	1	1.635.000	1	11.400.000	1	13.030.000	1	13.095.150	1	13.095.150
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyusunan dokumen pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk			Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk yang disusun tahun N	6	884.956.329	6	153.810.780	6	1.166.557.750	6	1.490.483.000	6	1.497.935.415	6	1.509.085.415
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Lap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Lap		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga yang disusun tahun N			1	635.000	1	64.190.000	1	63.275.000	1	63.591.375	1	63.591.375
	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran DataKeluarga	Terlaksananya Pemanfaatan Data HasilPemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluargayang Dimanfaatkan	Dok		Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan tahun N	1	600.000						-		-	1	600.000

	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dok		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang disusun tahun N	1	3.713.335	1	24.102.000	1	10.550.000		-	-	1	10.550.000
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Lap Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Lap		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga yang disusun tahun N	1	464.041.497	1	12.240.000	1	246.180.000	1	160.988.000	1	161.792.940	161.792.940
	Pengolahan dan PeLap Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan PeLap Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dok Pengolahan dan PeLap Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dok		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang disusun tahun N	12	416.601.497	12	115.193.780	12	839.367.750	12	1.260.000.000	12	1.266.300.000	1.266.300.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan PeLap Program KKBPK	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan PeLap Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Lap Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Lap		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan yang			1	1.640.000	1	6.270.000	1	6.220.000	1	6.251.100	6.251.100
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya angka kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Tingkat Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)		Kabid Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan DP2KBP3A	Jumlah PUS yang ingin berKB tetapi tidak terlayani / Jumlah pasangan usia subur x 100	8,96	1.457.135.200	18,88	3.199.101.600	11,57	4.047.961.850	13,9	3.084.216.000	13,5	3.099.637.080	4.072.156.580
		Meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Capaian Kinerja Pemakaian kontrasepsi Modern/MCPR		Kabid KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP2KBP3A	Jumlah peserta KB Aktif Modern / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100	81,98	1.846.316.482	67,78	1.131.110.120	70,53	3.943.334.575	64	2.004.564.000	64	2.014.586.820	2.014.586.820
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Cakupan masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)			Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi KIE) / Jumlah sasaran masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi KIE) x 100	100	137.540.400	82,69	1.818.796.600	75,36	1.783.153.100	100	2.045.467.000	100	2.055.694.335	2.083.351.935
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana			1	3.700.000	20	162.014.000	20	248.640.000	20	249.883.200	249.883.200
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dok Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dok		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana yang disusun tahun N	1	50.730.000	3	27.657.600					-	3	27.657.600

	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta MediaLuar Ruang	Jumlah Dok Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta MediaLuar Ruang	Dok		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang yang	3	86.810.400	2	20.580.000	4	140.070.000	4	148.730.000	4	149.473.650	4	149.473.650
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB) Melalui Rakorcam, Rakordes, dan Minilok	Jumlah Lap Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB) Melalui Rakorcam, Rakordes, dan Minilok	Lap		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana yang disusun tahun N			10	769.056.000	10	280.216.000	10	352.867.000	10	354.631.335	10	354.631.335
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Lap		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan yang disusun tahun N			24	920.903.000	24	1.120.257.100	24	1.198.312.000	24	1.204.303.560	24	1.204.303.560
	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Lap Hasil Pengendalian ProgramKKBPK	Lap		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK yang disusun tahun N			2	76.900.000	3	80.596.000	3	96.918.000	3	97.402.590	3	97.402.590
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/PetugasLapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatnya kualitas hasil penyuluhan program oleh Tenaga Penyuluh KB/PetugasLapangan KB (PKB/PLKB)	Tingkat kesertaan KB di Daerah dengan kesertaan rendah			Jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur 15-19 / Jumlah wanita kelompok umur 15 - 19 X 1000	50,3	944.105.000	50,3	792.000.000	23,64	508.068.750	50,3	499.290.000	50,3	501.786.450	50,3	1.445.891.450
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk PKB/PLKB	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk PKB/PLKB	Jumlah Lap Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk PKB/PLKB	Lap		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) yang	24	944.105.000								-	24	944.105.000

	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader IMP	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader IMP	Orang		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) tahun N			960	792.000.000	960	508.068.750	979	499.290.000	979	501.786.450	979	501.786.450
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Terlaksananya pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Cakupan Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP			Jumlah Peserta KB Aktif / Jumlah PUS x 100	47,45	1.846.316.482	26,93	1.131.110.120	100	3.943.334.575	100	2.004.564.000	100	2.014.586.820	100	2.014.586.820
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lap Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Lap		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya tahun N	12	259.076.402	12	16.141.120	12	40.160.100	12	45.902.000	12	46.131.510	12	46.131.510
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan KesertaanPenggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti KesertaanPenggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tahun N			3093	793.375.000	3249	1.821.284.000	3075	1.134.857.000	3249	1.140.531.285	3249	1.140.531.285
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Lap Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Lap		Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP tahun N	2	587.820	4	16.665.000	5	19.680.000	5	21.980.000	5	22.089.900	5	22.089.900
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20	1.469.751.010	13	269.954.000	15	2.013.038.475	59	737.442.000	15	741.129.210	15	741.129.210
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lap Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Lap		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya tahun N	2	102.418.250	2	14.720.000	2	21.592.000	2	27.958.000	2	28.097.790	2	28.097.790
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional PelayananKB Bergerak	Jumlah Lap Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Lap		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Tahun N	5	14.483.000	5	7.415.000	4	22.350.000	4	30.450.000	4	30.602.250	4	30.602.250

	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang		Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria Tahun N			0	12.840.000	100	5.230.000	100	5.975.000	100	6.004.875	100	6.004.875
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok Kerja KKBPk yang efektif			Jumlah stakeholders / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPk	5	375.489.800	34	588.305.000	34	1.756.740.000	34	539.459.000	34	542.156.295	34	542.913.195
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi			5	756.900								-	5	756.900
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dok Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dok		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB tahun N	1	374.732.900	1	1.805.000	2	1.234.220.000	2	4.343.000	2	4.364.715	2	4.364.715
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPk di Kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) diKampung KB	Kampung		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB tahun N			34	586.500.000	34	522.520.000	34	535.116.000	34	537.791.580	34	537.791.580

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diketahui bahwa capaian suatu program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi sebuah kinerja dalam bentuk suatu keluaran/hasil/dampak yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya pembangunan (*input*). Untuk itu diperlukan suatu Indikator Kinerja yang akan berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan melalui suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk sub keluaran (*sub output*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada lima tahun mendatang merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 7.1.								
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana								
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa								
(Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026)								
No.	(x) Indikator Tujuan PERANGKAT DAERAH; (xx) Indikator Sasaran PERANGKAT DAERAH; (xxx) Indikator Program PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Pada Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
1	Indeks Kesehatan	0,731	0,737	0,742	0,747	0,751	0,756	0,756
1.1.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,190	1,99	1,17	2,39	2,77	2,76	2,76
1.1.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,144	1,12	1,9	1,36	1,84	1,80	1,80
1.1.2.	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	10,40	8,96	18,88	11,57	13,90	13,50	13,50
1.1.3.	Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80,19	81,98	67,78	70,53	64,00	64,00	64
2	Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)	0,00	9235	9324	9413	9502	9591	9591
2.1.	Cakupan Keluarga Sejahtera	11,19	92,15	82,84	85,01	88,00	89,00	89,00
2.1.1.	Penurunan Angka Keluarga Pra Sejahtera	17,81	7,85	17,16	16,71	16,55	16,00	16

No.	(x) Indikator Tujuan PERANGKAT DAERAH; (xx) Indikator Sasaran PERANGKAT DAERAH; (xxx) Indikator Program PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Pada Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
3	Nilai Reformasi Birokrasi	3,30	51,32	51,91	52,5	55	57,5	57,5
3.1.	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	BB	A	BB	BB	A	A
3.1.1.	Peningkatan Nilai Akip Dinas P2KBP3A	78,49	78,49	81,79	72,83	75,49	81,79	81,79
4	IPG	93,76	93,788	93,96	94,19	94,48	94,84	94,84
4.1.	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	8,00	8,19	11	12	13	14	14
4.1.1.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan analisis gender dalam proses penganggaran	19,00	52,73	52,73	53,57	54,57	55,57	55,57
4.1.2.	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik,ekonomi sosial dan budaya	0,036	0,036	0,010	0,062	0,062	0,072	0,072
4.1.3.	Persentase kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	8,50	9,18	6,55	5,28	5,2	4,69	4,69
5	Status KLA	233		Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya
4.1.4.	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	100	568	615	661	707	754	754
5.1.	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	57	100	100,00	100,00	100	100	100
5.1.1.	Peningkatan persentase Pemenuhan Indikator KLA	83	43	50,59	50,30	70,07	75,4	75,4
5.1.2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,04	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	0,025

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 disusun sesuai amanat perundang-undangan yang terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Bahwa Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 tetap merupakan implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dikendalikan sepenuhnya oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa selaku kepala PD dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sumbawa;
- c. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dilaksanakan secara akuntabel dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik dari seluruh aparatur sipil negara di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa melalui Kepala Dinas yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.

Perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan, maka dengan optimlaisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam lima tahun ke depan. Dengan terlaksananya seluruh yang direncanakan diharapkan akan terbangun tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan akurat.

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH